



**Kebijakan Ekonomi Makro
Khususnya Stabilisasi Harga
dan Penanggulangan Kemiskinan**

Mohamad Ikhsan

**Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai
Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia
Jakarta, 27 November 2010**



**Kebijakan Ekonomi Makro
Khususnya Stabilisasi Harga
dan Penanggulangan Kemiskinan**

Mohamad Ikhsan

**Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai
Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia
Jakarta, 27 November 2010**

Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga
dan Penanggulangan Kemiskinan / Mohamad Ikhsan. -
Jakarta: Lembaga Penerbit 2010

ISBN

Layout : Hendika (Humas Media Center FEUI)
Hak Cipta © 2010 : Penulis
Hak Penerbitan : Lembaga Penerbit

KATA PENGANTAR

Kemiskinan masih menjadi agenda besar pemerintah di negara berkembang termasuk Indonesia. Laporan MDGs dari Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang memang telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak 446 juta dalam kurun 1990-2005. Tetapi penurunan ini masih di bawah sasaran yang diinginkan. Diperkirakan masih ada 918 juta orang miskin pada tahun 2015 atau kira-kira 53 juta di atas perkiraan sebelum krisis Global.

Sebagian memang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi global tetapi sebagian disebabkan karena pertumbuhan ekonomi ternyata tidak cukup untuk mendorong penurunan kemiskinan seperti yang diinginkan. Dibutuhkan intervensi pemerintah yang efektif yang dapat membantu proses percepatan kemiskinan tersebut.

Disadari bahwa kemiskinan adalah proses yang kompleks karena meliputi banyak dimensi dan bekerja bersinggungan (overlap) satu sama lainnya. Persoalan kemiskinan bukan saja meliputi masalah ekonomi tetapi menyangkut masalah sosial, politik dan budaya. Sudah terbukti pula, penekanan pada dimensi kesenjangan konsumsi saja (hanya pada persoalan moneter) saja tidak cukup menjawab persoalan kemiskinan termasuk membebaskan penduduk dari perangkap kemiskinan. Walaupun demikian, dimensi ekonomi tetap merupakan inti dari kemiskinan. Menyelesaikan dimensi kemiskinan lain tanpa menyelesaikan masalah ekonomi jelas tidak menyelesaikan apa-apa. Singkatnya, masalah ekonomi menjadi semacam *necessary condition but not sufficient* untuk menanggulangi kemiskinan.

Dalam dimensi ekonomi pun, pertumbuhan ekonomi dianggap merupakan obat paten yang menjadi inti dari penanggulangan kemiskinan. Sebagian disebabkan karena keterbatasan aset yang dimiliki orang miskin yaitu pekerjaan (labor). Pertumbuhan ekonomi akan membuka peluang yang lebih besar bagi orang miskin untuk mengembangkan asetnya. Tetapi

peluang keluarga miskin bisa tertutup jika akses mereka kepada sumber daya yang produktif dan pasar terhambat bahkan seringkali tertutup sama sekali. Fungsi pemerintah yang efektif seharusnya dapat menghilangkan hambatan-hambatan ini dan sekaligus mengoreksi mekanisme pasar agar bekerja untuk kepentingan orang miskin.

Salah satu intervensi pemerintah tersebut adalah menjaga agar stabilisasi harga umum dapat terjadi. Stabilisasi harga menjadi fondasi agar pertumbuhan ekonomi bisa tinggi dan berkesinambungan. Harga yang berfluktuasi akan menyulitkan pelaku ekonomi untuk melakukan keputusan ekonomi dengan baik. Karena, sebagian besar pelaku ekonomi adalah penghindar resiko, maka inflasi yang tinggi akan menyebabkan pelaku ekonomi cenderung akan status quo dan jika aksesnya ada di pasar global akan memindahkan sumber daya ke negara lain yang inflasinya lebih rendah. Keluarga miskin karena keterbatasan aset dan kemampuan mengelola asetnya terbatas cenderung lebih risk averse, sehingga tidak berani mengambil keputusan walau peluang bisnisnya ada. Bahkan kekhawatiran ini berlanjut dalam investasi jangka panjang baik dalam keputusan investasi pendidikan dan kesehatan. Tindakan ini menyebabkan orang miskin mempunyai peluang tertinggal dalam gelombang pertumbuhan ekonomi. Jadi, pengendalian inflasi merupakan kebijakan yang ramah keluarga miskin.

Pengendalian inflasi di Indonesia lebih kompleks dibandingkan dengan negara lain karena menyangkut persoalan struktural. Akibatnya, kebijakan moneter tidak cukup efektif bekerja untuk mengendalikan inflasi. Hal ini terbukti dari inflasi di Indonesia yang lebih tinggi dan bergejolak dibandingkan dengan negara tetangga.

Argumen yang dibangun dalam manuskrip pidato pengukuhan ini adalah persoalan inflasi berasosiasi dengan masalah konektivitas domestik yang belum memadai dan bekerja seperti yang diinginkan. Masalah konektivitas ini tidak hanya menyangkut masalah infrastruktur fisik tetapi juga masalah infrastruktur lunak yang menghambat bukan hanya pergerakan barang dan jasa tetapi juga mengurangi kesempatan keluarga miskin untuk menikmati gelombang pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan konektivitas bukan hanya membuat perekonomian lebih fleksibel

Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan

dan memiliki peredam kejut (shock absorber) sehingga harga bisa lebih terkendali tetapi akan menurunkan biaya transaksi sehingga meningkatkan daya saing. Singkatnya, konektivitas merupakan kebijakan yang sekaligus ramah pertumbuhan dan inflasi rendah, sehingga sangat ramah keluarga miskin.

Perbaikan konektivitas tidak sepenuhnya bisa diselesaikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan apalagi fakta adanya heterogenitas yang tinggi dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasikan merupakan jawaban bagi kebijakan penanggulangan kemiskinan masa kini dan mendatang.

Jakarta, 27 November 2010

Prof Dr Mohamad Ikhsan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
Mengapa Penanggulangan Kemiskinan Masih Menjadi Agenda Penting Pembangunan Hingga 1-2 Dekade ke Depan.....	4
Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan: Pertumbuhan Ekonomi Penting Tetapi Tidak Cukup.....	10
Stabilitas Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan: Peran Stabilitas Harga Sama Pentingnya dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	21
Sumber Inflasi di Indonesia.....	28
Konektivitas Domestik sebagai Kebijakan Ramah Pertumbuhan dan Ramah Inflasi Rendah.....	30
Rekapitulasi.....	33
Penutup.....	34
Daftar Pustaka.....	40

Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan Ekonomi Makro khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan ¹

Mohamad Ikhsan

Yang Terhormat,
Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Boediono
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia
Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia
Ketua dan Para Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia
Para Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Indonesia
Guru Besar Tamu dari berbagai Universitas di Indonesia
Para Staf Pengajar dan Karyawan Universitas Indonesia
Para Mahasiswa dan Para Undangan sekalian yang saya muliakan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Mengawali pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya mengajak Hadirin untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat izin dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir dalam

¹ Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Profesor Boediono dan Dr M.Chatib Basri yang mendorong saya untuk menyampaikan pidato dalam topik ini. Dalam menulis pidato ini, saya terbantu oleh Dr Denni Purbasari dan Dr Yoga Affandi serta Pugo Sumbodo yang membantu baik dalam menyiapkan bahan dan data serta perhitungan kuantitatif serta diskusinya. Terima kasih pula kepada Dr Sudarno Sumarto yang telah membaca dan mengedit pidato ini. Namun seperti selayaknya, isi dan tanggung jawab menjadi tanggung jawab penulis.

penyelenggaraan pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Bapak, Ibu, Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan saya yang berjudul:

“Kebijakan Ekonomi Makro khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan”

Ruang lingkup kebijakan ekonomi makro sebetulnya sangat luas. Tetapi saya ingin memfokuskan pembahasan terutama mengenai hubungan antara stabilisasi harga dan penanggulangan kemiskinan. Topik ini saya pilih mengingat pembahasan tentang kebijakan ekonomi makro dan kemiskinan umumnya menyoroti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sementara, walaupun tergolong sangat penting, peran stabilisasi harga dan penanggulangan kemiskinan praktis tidak banyak dieksplorasi. Hubungan keduanya, sepertinya dianggap “*given*” walaupun sebetulnya lebih kompleks dibandingkan antara pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, eksplorasi hubungan antara inflasi dan sumber pemicunya dengan kemiskinan menjadi penting karena beberapa hal. Pendapat yang berkembang termasuk pada sebagian pengambil keputusan, menganggap bahwa penanganan inflasi belum menjadi isu sentral dalam pengambilan keputusan. Inflasi masih lebih dianggap sebagai masalah umum semata dan jarang dikaitkan dengan isu penanggulangan kemiskinan.² Padahal, sebagaimana telah terbukti dalam masa pasca krisis khususnya pada periode 1999-2004 – saat laju pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 3-4% per tahun – penurunan tingkat kemiskinan sebesar 8 poin persentase, dari

² Pengalaman pribadi penulis sebagai Team penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan baik dibawah kendali Badan Penanggulangan Kemiskinan (1999-2000) maupun Bappenas (2000-2003) sangat sulit meyakinkan peserta lain tentang pentingnya inflasi sebagai elemen penting dalam penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan Ekonomi Makro **Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan**

24% (1999) menjadi 16% (2004), lebih disebabkan karena tingkat inflasi yang berhasil dikendalikan terutama harga kelompok barang yang sensitif terhadap keranjang (bundle) konsumsi rumah tangga miskin seperti beras.

Literatur yang mengkaitkan peran inflasi dengan kemiskinan pun tergolong sedikit (Easterly dan Fischer, 2000). Kalaupun ada, sebagian besar merupakan bagian pembahasan dari peran kebijakan makro atau dampak kebijakan reformasi ekonomi terhadap kemiskinan. Awalnya, fokus studi empiris lebih banyak menggunakan data negara-negara maju. Belakangan beberapa studi menggunakan data negara berkembang khususnya negara-negara di Amerika Latin dilakukan (lihat Cardoso, 1992 misalnya). Keterkaitan antara inflasi dan kemiskinan menjadi hangat kembali saat krisis pangan global tahun 2008 yang bersamaan dengan krisis energi dan krisis finansial yang berpotensi menciptakan ratusan juta orang miskin baru.

Upaya penanggulangan kemiskinan serta menjaga kesejahteraan penduduk yang tergolong rentan miskin tidak bisa mengabaikan peran stabilitas harga karena stabilitas harga bukan saja berperan sebagai fondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi tetapi juga berperan langsung sebagai elemen penting dalam penentuan biaya hidup penduduk. Secara teknis, dengan menggunakan definisi defisit konsumsi, inflasi akan menentukan secara tidak langsung pengeluaran per kapita penduduk dan secara langsung mempengaruhi pergerakan garis kemiskinan. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin besar kebutuhan peningkatan pengeluaran nominal per kapita yang dibutuhkan untuk menjaga agar tingkat kemiskinan tidak berubah.

Walaupun pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat inflasi mempunyai korelasi positif terhadap tingkat kemiskinan, namun dalam praktek sehari-hari keduanya tidak berjalan beriringan. Sering terjadi *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi melalui ekspansi permintaan agregat biasanya akan diikuti dengan pertumbuhan tingkat harga umum. Sebaliknya, jika proses disinflasi dengan kebijakan ekonomi makro yang ketat dapat memukul momentum pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya tidak jelas dampaknya terhadap kemiskinan. Oleh karenanya, perlu disusun kebijakan yang saling komplemen satu sama lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan

Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan

yang sekaligus menurunkan tingkat inflasi. Jika hal ini terwujud, niscaya penurunan tingkat kemiskinan makin dapat dipercepat. Kandidat kebijakan yang komplementer terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi adalah kebijakan-kebijakan yang bekerja di sisi penawaran.

Sebelum saya menguraikan tentang kebijakan anti inflasi dan pro pertumbuhan ekonomi tersebut, bagian berikutnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengapa penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu penting dalam dekade mendatang dan bagaimana inflasi dapat mempengaruhi kemiskinan.

I. Mengapa Penanggulangan Kemiskinan Masih Menjadi Agenda Penting Pembangunan Hingga 1-2 Dekade ke Depan

Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang penanganannya tidak hanya menyangkut agenda atau kebijakan ekonomi semata tetapi juga menyangkut agenda kebijakan sosial, politik dan budaya. Memahami persoalan ekonomi keluarga miskin saja belum cukup memadai untuk membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif. Meski demikian, masalah ekonomi tetap menjadi inti dari masalah kemiskinan. Dalam kebijakan ekonomi, ekonomi makro merupakan fundamentalnya. Jadi pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan ekonomi makro menjadi kunci utama menyusun kebijakan anti kemiskinan.

Walaupun telah mencatat kemajuan yang berarti dalam penurunan angka kemiskinan baik dalam periode 1970an hingga 1996 dan antara 2000-2010, kemiskinan akan tetap menjadi isu penting dalam agenda pembangunan. Ada beberapa alasan mengapa kemiskinan akan tetap menjadi agenda penting dalam pembangunan Indonesia bahkan hingga dua dekade mendatang. Pertama, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tergolong besar. Per Maret 2010, masih terdapat 7 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin, yakni mereka yang belum dapat memenuhi kebutuhan minimal 2100 kalori per kapita per hari. Jumlah penduduk miskin bertambah secara signifikan jika kebutuhan non makanan dimasukkan dalam garis kemiskinan. Kurang lebih 31 juta penduduk belum dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok (*basic need*) yang diukur dengan garis kemiskinan nasional. Jumlah penduduk miskin akan bertambah secara signifikan jika garis kemiskinan

dinaikkan 30% hingga mencapai \$2 PPP/kapita, yakni hampir separuh penduduk Indonesia masuk kategori penduduk miskin.

Kedua, menyangkut masalah penduduk yang rentan. Dua dari sepuluh orang Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Bencana dan musibah dapat dengan mudah membuat orang yang tadinya tidak miskin menjadi miskin. Dampak dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terhadap rumah tangga seperti penyakit, bencana alam ataupun krisis ekonomi global, dan guncangan lain akibat reformasi kebijakan, dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Kejadian bencana alam Gunung Merapi misalnya hampir dipastikan dapat meningkatkan jumlah orang miskin yang cukup signifikan, walaupun diperkirakan tidak meningkatkan persentase tingkat kemiskinan secara nasional.

Ketiga, menyangkut dimensi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia memiliki berdimensi jamak, bukan sekedar diukur berdasarkan kesenjangan konsumsi. Perluasan definisi kemiskinan yang mencakup dimensi kebutuhan dasar hidup lain termasuk akses terhadap pelayanan umum mengubah potret kemiskinan. UNDP dalam laporan Global Human Development Report 2010 yang baru diluncurkan dua minggu lalu memperlihatkan indeks kemiskinan Indonesia mengalami peningkatan saat dimensi kemiskinan diperluas. Gambaran ini memberikan implikasi bahwa rumah tangga miskin Indonesia bukan hanya memiliki defisit dalam bentuk konsumsi tetapi juga defisit dalam kebutuhan hidup dasar lainnya. Analisis kuantitatif menunjukkan adanya korelasi yang kuat antar dimensi kemiskinan tersebut. Namun belum diketahui secara jelas apakah defisit dalam kebutuhan dasar ini mempunyai hubungan kausalitas terhadap defisit kesenjangan konsumsi.

Kemiskinan di Indonesia juga memiliki heterogenitas yang tinggi baik dilihat dari penyebab kemiskinan sendiri maupun lokasinya. Jumlah penduduk miskin pun sangat heterogen dan berbeda-beda penyebabnya. Ada daerah yang tingkat kemiskinannya sudah sangat minimum – seperti Jakarta – tetapi masih banyak daerah dimana porsi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum 2100 kalori per hari masih sangat besar – seperti Papua dan NTT. Penyebabnya pun berbeda-beda. Sebagian karena faktor *endowment* seperti rendahnya pendidikan atau persoalan

kepemilikan aset, seperti lahan, tetapi banyak pula daerah terjebak dalam perangkap kemiskinan karena persoalan isolasi.

Heterogenitas permasalahan ini memberikan isyarat kebijakan anti kemiskinan harus didasarkan kepada faktor-faktor penyebabnya. Hal ini berarti kebijakan anti kemiskinan seperti yang saya uraikan akan berbeda-beda untuk setiap daerah. *No one size fits all*. Pola kebijakan pembangunan yang tersentralisasi seperti yang dilakukan pada era 1970-an hingga 1990-an dan berhasil pada saat itu, belum tentu akan berhasil jika diterapkan kembali pada masa kini. Kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasi seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) lebih mampu menjawab persoalan lokal. Namun karena benefit per kapitanya masih relatif rendah, dampaknya kepada agregat kemiskinan belum banyak dirasakan.

Tantangan yang dihadapi baik dalam penyusunan kebijakan hingga implementasinya pun makin kuat akibat dari perubahan lingkungan global dan tuntutan perubahan politik dalam negeri seperti desentralisasi dan proses transisi menuju demokrasi.

Globalisasi adalah suatu proses yang tak terelakkan khususnya terhadap perekonomian yang terbuka seperti Indonesia. Pada satu sisi, globalisasi akan menciptakan kesempatan bagi para pelaku ekonomi termasuk kelompok miskin untuk berpartisipasi di pasar global. Tetapi di sisi lain globalisasi juga akan menciptakan risiko yang cukup tinggi bagi golongan miskin, khususnya ketika terjadi guncangan eksternal yang akhir-akhir ini frekuensinya semakin sering.

Tantangannya adalah bagaimana membuat kelompok miskin dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses globalisasi dan dapat mengambil manfaat optimal dari proses globalisasi dan pada waktu bersamaan menyediakan dan mempersiapkan mereka untuk mampu menghadapi berbagai guncangan atau gejolak yang diakibatkan oleh globalisasi tersebut. Proses perubahan ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dalam masa transisi selalu timbul biaya tambahan yang harus ditanggung pemerintah mengingat kelompok yang lambat menanggapi perubahan ini biasanya kelompok rumah tangga miskin dan rentan. Jadi tantangan

Kebijakan Ekonomi Makro **Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan**

yang dihadapi oleh pemerintah pun sangat berat yaitu harus memperkuat kemampuan rumah tangga miskin melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan – yang dampaknya baru akan terasa dalam jangka menengah dan panjang – dan sekaligus menyiapkan jaring pengaman sosial sebagai bagian dari biaya transisi.

Tantangan lain adalah perubahan teknologi yang telah mengakibatkan kandungan tenaga kerja untuk setiap kegiatan produksi mengalami penurunan. Tanpa ada perubahan dalam basis kegiatan ekonomi, perubahan ini akan diterjemahkan dalam penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi. Dahulu kita bisa menciptakan 400 ribu tenaga kerja untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, dewasa ini hanya sekitar 200 ribu saja lapangan kerja baru yang bisa tercipta sebagai akibat ekspansi 1% perekonomian nasional (Bank Dunia, 2009).

Reformasi pasar pun tidak akan selalu otomatis menguntungkan penduduk miskin. Di banyak kasus, golongan miskin akan mudah menjadi korban dari reformasi yang dijalankan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa reformasi institusi merupakan elemen penting untuk menjamin golongan miskin agar tidak menjadi korban dari reformasi ini. Reformasi institusi dalam hal ini kan dapat menjadi modal yang efektif untuk melaksanakan program yang tertarget. Sebagai contohnya, saat PLN diizinkan untuk menentukan tarif yang kompetitif untuk memperluas kemampuan melakukan ekspansi jaringan dan aksesibilitas, pemerintah secara bersamaan perlu memberikan dana kompensasi sosial yang menjembatani kemampuan membayar rumah tangga miskin dan biaya produksi. Langkah ini telah diimplementasi sejak tahun 2002 dimana subsidi listrik bukan subsidi kepada PLN tetapi subsidi kepada pelanggan kecil. Pola ini berubah sejak kenaikan harga minyak tahun 2005 dimana subsidi kepada pelanggan kecil berubah menjadi subsidi kepada semua pelanggan. Bahkan pelanggan besar menikmati benefit per kapita lebih besar dibandingkan dengan pelanggan kecil (*Ikhsan, forthcoming*)

Tantangan lain adalah meningkatnya kemiskinan di daerah perkotaan dan perkiraan meningkatnya penduduk kelompok usia tua. Fenomena ini belum terlalu terlihat dalam 5-10 tahun ini tetapi akan menjadi masalah besar jika tidak ditangani segera. Masalah ini juga merupakan masalah baru

dan keduanya dapat dipastikan akan menyebabkan biaya penanggulangan kemiskinan makin tinggi.

Pemberlakuan desentralisasi dilandasi oleh adanya perubahan lingkungan yang ada dalam masyarakat. Secara teoretis, desentralisasi adalah kebijakan yang pro atau mendukung orang miskin karena desentralisasi akan menyediakan jasa publik yang efektif dan efisien. Perspektif tentang program pengentasan kemiskinan dan heterogenitas yang dihadapi golongan miskin di Indonesia menunjukkan pula kebijakan anti kemiskinan hanya dapat ditangani oleh program-program daerah bukan program-program nasional seperti pada masa lampu. Sehingga, desentralisasi dalam bentuk pelimpahan tugas pemerintah pusat ke daerah merupakan respon yang tepat.

Tetapi kondisi yang ada dan merujuk pada pengalaman negara lain termasuk pengalaman hampir lima tahun pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Sebagai salah satu contoh di Filipina kuantitas dan kualitas barang dan layanan publik semakin menurun setelah kebijakan desentralisasi diluncurkan. Kondisi ini mengakibatkan golongan miskin akan menjadi korban karena buruknya penyediaan prasarana publik oleh pemerintah daerah. Walaupun berbagai studi menunjukkan tidak ada bukti yang sistematis yang menunjukkan penurunan kuantitas dan kualitas barang public, tetapi yang jelas tujuan dari desentralisasi untuk memperbaiki penyediaan barang dan jasa publik yang lebih efisien belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan studi yang lebih mendalam mengapa antara teori dan realisasi ada perbedaan yang cukup mencolok yang terjadi di banyak negara berkembang yang menjalankan desentralisasi.

Kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasi juga terhambat oleh perbedaan yang mencolok dari kapasitas perencana dan pelaksana di daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota. Daerah yang relatif miskin umumnya juga memiliki kesenjangan kapasitas yang besar. Tambahan DAU atau DAK atau melalui proyek dekonsetrasi untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan seringkali tidak efektif. Hal ini ditunjukkan oleh analisis kuantitatif yang mencoba melihat korelasi antara DAU dengan dampak kemiskinan yang menunjukkan hubungan yang negatif.

Reformasi program pengentasan kemiskinan juga terhalang oleh transisi demokrasi dimana demokrasi tidak dapat berjalan secara baik dan kelompok miskin tetap tertekan di pasar politik. Suara golongan miskin sering dimanipulasi oleh kelas menengah dan atas dimana mereka dapat mengendalikan kondisi politik dan opini publik. Salah satu kasus menarik yang dapat dijadikan contoh adalah penundaan tentang penyesuaian harga BBM. Kelas menengah enggan menerima penyesuaian harga karena mereka penerima subsidi BBM terbesar, walaupun penyesuaian BBM ini --jika anggaran yang dihemat dari penyesuaian BBM dialokasikan untuk program anti kemiskinan-- akan membantu golongan miskin. Konsultasi dengan golongan miskin mungkin merupakan solusi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara menjamin bahwa seluruh impelentasi program selalu mendukung golongan miskin. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa pemberdayaan merupakan pilar utama dari strategi baru pengentasan kemiskinan.

Pemerintah pun dalam era sekarang tidak bisa dengan leluasa melakukan kebijakan anggaran karena berdasarkan UU No 17/2003 harus selalu berkonsultasi dengan DPR. Perubahan ini di satu pihak akan memberikan akuntabilitas dengan melalui *checks and balances* yang lebih baik tetapi juga mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Contoh yang paling aktual adalah penggunaan dana BBM. Walaupun dana penghematan subsidi tersedia, tetapi pemerintah tidak bisa membelanjakannya dalam program kompensasi karena berdasarkan UU setiap pos pengeluaran harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Tantangan di atas makin diperkuat dengan kenyataan banyak kebijakan fiskal sebagai instrumen sentral dalam pengurangan kemiskinan gagal mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sebagai salah satu contoh yaitu subsidi BBM. Data Susenas secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan kaya dibandingkan dengan golongan miskin. Implikasi dari pengurangan subsidi BBM melalui pelepasan harga BBM merujuk harga pasar akan memperbaiki distribusi pendapatan, tetapi dilain pihak kemiskinan absolut akan naik secara tajam. Kombinasi program pengurangan subsidi dengan lebih memperjelas target program kompensasi

tidak hanya akan memperbaiki distribusi pendapatan (baca keadilan) tetapi mengurangi kemiskinan absolut secara signifikan. Langkah ini lah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM pada tahun 2005 dan 2008.

Karakteristik kemiskinan dan tantangan-tatangan tersebut di atas menyebabkan program anti kemiskinan akan terus menjadi agenda penting pembangunan hingga dua dekade mendatang, walaupun sasarannya bisa berbeda. Apalagi jika definisi dan sasaran kemiskinan diperluas hingga mencakup kelompok hampir miskin, sumber daya yang dimiliki pemerintah tidak akan cukup mengatasi masalah kemiskinan ini sebagai akibat makin meningkatnya biaya per penduduk miskin, meningkatnya kompleksitas kemiskinan sendiri hingga persoalan lokasi yang makin tersebar.

II. Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan: Pertumbuhan Ekonomi Penting Tetapi Tidak Cukup

Tidak ada yang meragukan tentang (potensi) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan. Puluhan studi telah menemukan asosiasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, baik kemiskinan moneter (konsumsi/pendapatan) maupun non-moneter. Salah satu studi yang mencakup panel data melibatkan 80 negara dan meliputi periode selama 4 dekade menunjukkan pertumbuhan kelompok penduduk 20 persen terendah bergerak proporsional – *one for one* – dengan pertumbuhan PDB per kapita. Studi ini juga menemukan bahwa tidak ada perbedaan pola antara negara maju dan negara berkembang dan tidak ada perbedaan hubungan asosiasi ini jika dilihat per dekade. Artinya studi ini menemukan bahwa dampak (positif) dari pertumbuhan ekonomi sama baik terhadap penduduk miskin maupun penduduk secara keseluruhan (Dollar dan Kray, 2000)³ Sebagaimana ditunjukkan oleh studi yang lain yang melibatkan 143 episode pertumbuhan, dampak pertumbuhan (*growth effect*) mendominasi

³ Survey literatur menunjukkan bahwa walaupun berbagai studi mencoba menggugat hasil studi ini, tetapi sejauh ini tidak ada satu pun studi yang dapat menunjukkan hubungan yang sebaliknya. Yang ada hanya menunjukkan peran pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup dan komposisi sumber pertumbuhan penting. Begitu pula disamping pertumbuhan ekonomi faktor distribusi pendapatan memegang peran penting pula dalam menentukan poverty outcomes.

Kebijakan Ekonomi Makro **Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan**

determinan penurunan kemiskinan dan dampak distribusi pendapatan cenderung menjadi faktor yang minoritas (White and Anderson, 2002).

Bukti empiris selama puluhan tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan faktor utama yang mendorong penurunan angka kemiskinan selama 30 tahun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengurangan atau pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) dalam jangka panjang hanya dapat dicapai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia selama 30 tahun terakhir disebabkan oleh 2 hal, yaitu: adanya kenaikan rata-rata pengeluaran rumah tangga per-kapita dan adanya perubahan atas kestabilan dalam distribusi pendapatan. (Timmer, 2005)⁴. Hasil analisis kuantitatif yang dilakukan oleh Timmer menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan 0,2-0,3%.

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan dengan cepat di masa lalu, adalah keberhasilan untuk mempertahankan distribusi pendapatan tetap stabil. Dalam tiga dekade, terlihat bahwa laju pertumbuhan per kapita rumah tangga kuantil terendah tumbuh praktis sama dengan laju pertumbuhan pendapatan yang kemudian menghasilkan distribusi yang relatif stabil.

Studi JICA dan Waseda University (2010) serta update dengan data terbaru 2010 menunjukkan gambaran yang menarik. Pertama, sekitar 81% penduduk Indonesia tidak pernah berstatus sebagai penduduk miskin baik pada tahun 2008 dan 2009. Gambaran ini kurang lebih sama dengan matrik transisi pada tahun 2009 dan 2010 yang menunjukkan 80% penduduk Indonesia tidak pernah berstatus miskin pada dua tahun tersebut. Persentase penduduk yang berhasil mempertahankan statusnya sebagai penduduk bukan miskin cenderung lebih tinggi di kota dibandingkan di desa. Kurang lebih 96 % penduduk tidak miskin di kota, statusnya tidak berubah pada kedua tahun 2008 dan 2009. Sementara hanya 84% penduduk desa yang berhasil bertahan

⁴Timmer, Peter, Operationalising Pro Poor Growth: A country Case Study on Indonesia, A joint initiative of AFD, BMZ, DFID and the World Bank, 2004

sebagai penduduk bukan miskin pada periode tersebut.

Temuan kedua dari studi ini adalah sekitar 5-6 persen penduduk yang tetap miskin dalam periode tersebut. Secara kasar dapat dikatakan jumlah ini mencakup kelompok miskin yang permanen atau kronis. Sebagian dari kelompok miskin “permanen” dapat disebabkan karena faktor kapasitas atau karena faktor akses yang rendah. Yang menggembarakan dari statistik kemiskinan terakhir, indikator kemiskinan lainnya yaitu *poverty gap* – yang menunjukkan kesenjangan pendapatan per kapita (pengeluaran rata-rata) penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan *squared poverty gap* – yang menunjukkan distribusi atau standar deviasi pengeluaran sesama penduduk miskin – juga mengalami penurunan secara konsisten sejak tahun 2006. Artinya, terjadi dinamika dalam kelompok keluarga miskin dan pengeluaran kelompok ini juga meningkat. Ini berarti pula ekspansi perekonomian masih dapat membantu keluarga miskin keluar dari perangkap kemiskinan. Namun diperkirakan akan terdapat banyak keluarga miskin yang akan secara permanen terperangkap dalam kemiskinan dan memerlukan intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan sosial. Kelompok terakhir ini akan mewarisi kemiskinan antar generasi dan memerlukan intervensi yang tepat untuk memutuskan kemiskinan antar generasi ini. Untuk itu analisis lebih mendalam untuk mengenal karakteristik kelompok miskin yang permanen ini perlu dilakukan dan bukan hanya menjadi objek penelitian akademis yang menarik tetapi juga input yang penting dalam penyusunan kebijakan anti kemiskinan.

Ketiga, terdapat kurang lebih 14 persen penduduk yang pernah mengalami status miskin minimal satu kali dalam periode tersebut. Persentase inilah yang tergolong sebagai penduduk miskin yang sementara (*transitory*). Persentase penduduk transitory ini makin besar jika garis kemiskinan dinaikkan. Artinya peluang bahwa sebagian kelompok hampir miskin jatuh ke bawah garis kemiskinan oleh sebab guncangan tertentu juga tergolong besar. Ini berarti pula fokus program kemiskinan sebaiknya tidak terlalu kaku pada kelompok keluarga miskin tetapi dapat menyentuh kelompok yang dianggap hampir miskin. Beberapa program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau KUPEDES yang diperkirakan tidak menyentuh kelompok rumah tangga miskin tetapi sebagian dinikmati kelompok yang

Kebijakan Ekonomi Makro **Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan**

nyaris miskin. Jika didesain dan diimplementasi dengan cermat, program ini secara implisit berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang permanen dengan intervensi minimum dari pemerintah. Program-program seperti ini dapat menjaga akses penduduk baik untuk mengangkat kapasitas ekonomi rumah tangganya maupun untuk memelihara tingkat konsumsi (*consumption smoothing*). Proses screening melalui mekanisme perbankan juga dapat menghindari kemungkinan terjadinya elite capture atau intervensi politik pada program kemiskinan.

Studi ini menemukan pula persentase penduduk miskin kronis maupun miskin transien lebih tinggi di pedesaan dibandingkan penduduk di perkotaan. Hal ini membuktikan bahwa fokus program anti kemiskinan tetap harus berorientasi pedesaan – dan sektor pertanian. Karakteristik ini memang menyulitkan karena biaya pelayanan publik untuk mengatasi kemiskinan akan cenderung lebih tinggi.

Yang menarik, studi ini menunjukkan bahwa peluang keluarga miskin keluar dari perangkap kemiskinan makin besar jika posisinya makin dekat dengan garis kemiskinan. Peluang ini cenderung lebih besar dialami keluarga yang tinggal di perkotaan dibandingkan yang tinggal di pedesaan. Pada saat yang sama peluang keluarga miskin tetap berada dalam status yang sama – apakah miskin sekali⁵, miskin atau nyaris miskin- relatif rendah yaitu masing-masing 26 persen, 19 persen dan 18 persen dan jauh dibandingkan dengan peluang penduduk bukan miskin yang tidak berubah statusnya yaitu sekitar 90 %. Tetapi di desa peluang ini cenderung lebih tinggi yaitu masing-masing 30% untuk miskin sekali, 22% untuk miskin dan 21% untuk hampir miskin serta 84% untuk bukan miskin.

Ada beberapa pelajaran yang diperoleh dari pengalaman masa lalu dan karakteristik kemiskinan yang diuraikan di atas yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan masa mendatang.

⁵Miskin sekali didefinisikan jika pengeluaran per kapita per bulannya 20 persen atau lebih di bawah garis kemiskinan, miskin adalah jika pengeluaran perkapita hingga 20% di bawah garis kemiskinan dan nyaris miskin jika penduduk tersebut memiliki pengeluaran per kapita 20% di atas garis kemiskinan.

Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan

Pertama, mempertahankan momentum laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi prasyarat penting (*necessary condition*) dalam mendorong percepatan penurunan kemiskinan. Sebagaimana ditunjukkan oleh banyak studi bahwa komposisi sumber pertumbuhan ekonomi memegang peran yang penting dalam menentukan dampaknya terhadap penurunan kemiskinan. Sumber pertumbuhan harus terjadi pada sektor-sektor dimana orang miskin menggantungkan hidupnya. Pengalaman di era 1970an hingga pertengahan 1980an, ekspansi sektor pertanian baik melalui ekstensifikasi maupun peningkatan produktivitas telah berperan menurunkan jumlah orang miskin secara signifikan. Sementara sejak pertengahan 1980an hingga satu dekade, ekspansi sektor industri manufaktur yang padat karya telah membantu transformasi ketenagakerjaan dan memungkinkan penduduk miskin di sektor pedesaan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi di sektor industri manufaktur dan sektor lain yang terkait dengan sektor ini.⁶ Proses ini dimungkinkan karena pemerintah telah membuat investasi yang sangat substansial di bidang infrastruktur baik dibidang investasi sumber daya manusia (pembangunan fasilitas sekolah dan kesehatan) dan investasi bidang fisik. Pembangunan fasilitas ini dilakukan terutama di daerah pedesaan di Jawa, dimana daerah ini merupakan tempat tinggal sebagian besar orang miskin Indonesia. Manfaat dari pembangunan infrastruktur baru terealisasi setelah adanya perubahan kebijakan pemerintah dari *a trickle-down (growth) effect strategy* menjadi pembangunan sumber daya manusia dalam Pelita III. Di samping itu koreksi dalam kerangka ekonomi makro yang dilakukan sejak tahun 1978 dengan melakukan penyesuaian nilai tukar (devaluasi) dan deregulasi sektor keuangan tahun 1983 dan 1988 serta deregulasi sektor perdagangan secara gradual telah membantu proses momentum pertumbuhan ekonomi ini dan berperan menurunkan kemiskinan secara signifikan secara luas. Singkatnya, salah satu dari empat pengalaman menunjukkan bahwa dampak positif pertumbuhan terhadap kemiskinan sangat tergantung dari pertumbuhan sektoral dan pola distribusi. Jika pertumbuhan terjadi di suatu sektor dimana kemiskinan di sektor tersebut sangat padat, maka pertumbuhan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Jika sumber pertumbuhan suatu sektor

⁶Proses transformasi ketenagakerjaan ini kurang lebih merefleksikan apa yang pernah dipostulasikan oleh pemenang Nobel Sir Arthur Lewis dalam publikasinya tahun 1954 dan kemudian diperkaya oleh John-Harris dan Michael Todaro – yang kemudian dikenal dengan Harris Todaro Model.

Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan

dapat mendorong pergeseran kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian maka penurunan kemiskinan akan terjadi sangat cepat (pada akhirnya sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitasnya).

Pengalaman di masa lalu diperkirakan akan berlanjut, tetapi memerlukan modifikasi dalam struktur dan komposisi sumber pertumbuhan ekonomi. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab. Pertama, apakah peningkatan produktivitas sektor pertanian masih dapat menjadi andalan dalam penurunan kemiskinan? Kedua, apakah sektor manufaktur harus selalu menjadi andalan bagi transformasi ketenagakerjaan dan sekaligus memindahkan penduduk miskin dari sektor pertanian?

Pertanyaan pertama masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk mendapatkan jawabannya dan memerlukan teknik estimasi yang lebih kompleks karena penggunaan data historis tanpa memasukkan kendala ketersediaan tanah dan batasan teknologi akan mengarah pada kesalahan dalam penentuan kebijakan. Tetapi jawaban spekulasi dari saya adalah ruang peningkatan produktivitas masih tersedia dengan pola yang berbeda. Di Jawa, peningkatan produktivitas lahan dapat ditingkatkan dengan transformasi dalam sektor pertanian sendiri menuju kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah yang tinggi seperti hortikultura atau peternakan. Sementara di luar Jawa, ruang peningkatan produktivitas lahan masih tersedia dengan teknologi ada tetapi memerlukan investasi yang besar dalam perluasan jaringan irigasi.

Pertanyaan kedua menjadi menarik mengingat pengalaman di India, Cina dan Brazil yang menunjukkan bahwa pola pertumbuhan yang berbeda dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Artinya tidak ada pola dan struktur pertumbuhan yang tunggal terhadap penurunan kemiskinan. Di Cina, penurunan kemiskinan didorong oleh ekspansi sektor pertanian dan sektor manufaktur sementara di India lebih didorong oleh sektor jasa. Berbeda dengan Cina, India (dan juga Indonesia), penurunan kemiskinan di Brazil tidak didorong oleh pertumbuhan ekonomi. Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan sosial serta stabilitas harga merupakan sumber penurunan kemiskinan (Ravallion, 2010a). Sementara studi lain menunjukkan pula komposisi sumber pertumbuhan ekonomi menjadi kurang penting. Ravallion (Ravallion, 2010b) misalnya menunjuk

pengalaman India sebelum dan sesudah reformasi ekonomi 1991. Sebelum reformasi 1991, pertumbuhan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan menjadi sumber penurunan kemiskinan di India termasuk memberikan *spillover effect* bagi penurunan kemiskinan di perkotaan. Tetapi sesudah reformasi pengaruh ini berkurang dan berubah, dan ekspansi sektor perkotaan (terutama didorong oleh pertumbuhan sektor tersier) telah menjadi sumber penurunan kemiskinan dan secara bertahap telah memberikan *spillover effect* bagi penurunan kemiskinan di pedesaan.

Dua pertanyaan di atas memberikan beberapa indikasi yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut yaitu pertumbuhan ekonomi tetap menjadi driver utama dalam penurunan kemiskinan dan komposisi sumber pertumbuhan sektoral menjadi kurang relevan di masa mendatang, (Byerley, Janvry, dan Sadoulet, 2010). Di daerah pedesaan, penurunan kemiskinan akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan non farm sector sehingga pola pertumbuhan yang bersifat broad based dan seimbang akan lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan di masa mendatang.

Pelajaran yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan. Peran pemerintah memegang posisi sentral dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena masalah kemiskinan muncul akibat kegagalan mekanisme pasar⁷. Tetapi, pengalaman di banyak negara menunjukkan juga intervensi pemerintah tidak selama berhasil dan efektif. Potensi kegagalan pemerintah (*government failures*) sering terjadi⁸. Pengalaman Brazil dan India dapat menjadi contoh. Keberhasilan Brazil dalam menurunkan kemiskinan (absolut dan relatif) baru terjadi dalam 10 tahun terakhir sejak Presiden Cardoso dan Presiden Lula mengimplementasikan kebijakan sosial yang tepat (Ravallion, 2010). India pun tidak berbeda dan kinerja penurunan kemiskinan antar negara bagian juga berbeda. Besley, Burges dan Esteve-Volar (2007) menunjukkan

⁷Salah satu kegagalan mekanisme pasar yang menimbulkan masalah kemiskinan adalah ketidaksempurnaan informasi yang kemudian menyebabkan akses penduduk miskin ke pasar kredit berkurang malah tertutup. Masalah missing market merupakan contoh lain dari kegagalan mekanisme pasar yang mengakibatkan munculnya masalah kemiskinan.

⁸Contoh Government Failures kegagalan pemerintah Indonesia mengimplementasikan program jaring pengaman sosial saat krisis 1997/98 baik karena disainnya yang kurang tepat yang kemudian menimbulkan penyelewengan saat implementasinya.

Kebijakan Ekonomi Makro **Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan**

bahwa suatu negara bagian dengan pemerintah yang akuntabel, lebih pro bisnis dan memiliki iklim investasi yang baik, akses kepada lembaga keuangan dan human capital yang lebih baik, lebih besar aksesnya kepada property rights untuk rakyat miskin dan lebih inklusif dalam menyertakan perempuan dalam proses pertumbuhan ekonomi akan lebih sukses dalam menanggulangi kemiskinan. Kunci efektifitas intervensi pemerintah tidak terlepas dari kualitas penyusunan kebijakan, tatakelola dan faktor ekonomi politik.

Beberapa elemen penting dalam penyusunan penanggulangan kemiskinan itu adalah pertama, pentingnya suatu negara memiliki kerangka kebijakan ekonomi makro yang baik dan prudensial. Negara dengan kerangka ekonomi makro yang baik dan pruden tersebut biasanya berasosiasi dengan upaya stabilisasi harga- yang akan diuraikan lebih lanjut kemudian – dan situasi fiskal yang berkelanjutan dan responsif terhadap siklus bisnis dan kebijakan moneter yang baik pula.

Kedua, dimensi yang beragam dari kemiskinan juga menuntut pendekatan yang beragam dalam menangani kemiskinan sekarang dan terutama di masa mendatang. Ditemukan pula bahwa dampak kebijakan anti kemiskinan terhadap penurunan kemiskinan bersifat non linear: pengaruhnya tergantung pada besarnya (magnitude) dan ketercakupan dan keluasan (comprehensiveness) dari kebijakan tersebut.

- Berbagai riset menunjukkan bahwa kebijakan anti kemiskinan yang terlalu sempit dan berfokus pada definisi kemiskinan berdasarkan pendapatan tidak efektif dalam mengatasi kemiskinan khususnya dampak baliknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, reformasi ekonomi tidak selamanya akan memberikan dampak positif terhadap orang miskin tanpa perbaikan kapasitas *human capital* dari orang miskin.
 - Terdapat *threshold* dimana kebijakan akan punya arti dan berdampak. Contoh, tingkat imbal hasil ekonomi terhadap pendidikan (*return to education*) hanya terjadi jika yang bersangkutan menyelesaikan sekolah menengah atas (Bank Dunia, 2006) Akibatnya, sangat boleh jadi akan cenderung sia-sia kalau kita berinvestasi hanya sebatas wajib belajar
-
-

9 tahun. Atau yang lebih pasti, akan sia-sia kalau peningkatan waktu sekolah (*years of schooling*) diikuti pula dengan meningkatnya angka putus sekolah. Jadi usaha pemerintah dalam meningkatkan human capital tidak terbatas dalam membangun sekolah (*supply side approach*) tetapi harus mencakup usaha memastikan yang bersangkutan menyelesaikan sekolahnya (*demand side approach*).

- Lebih jauh lagi, ditunjukkan pula bahwa terdapat komplementaritas dari investasi dalam barang publik dan infrastruktur. Sebagai contoh, investasi dalam riset pertanian akan menghasilkan tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi jika dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan cold storage untuk membantu nelayan dalam pemasaran menjadi tidak terbantu jika listrik tidak tersedia dan kondisi jalan jauh dibawah memadai. Mobilitas penduduk akan tetap rendah walaupun pendidikan baik tanpa infrastruktur yang baik. Oleh karenanya, kebijakan anti kemiskinan yang dikembangkan harus komprehensif dan integratif. Pendekatan yang beragam ini menuntut kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasikan dengan perencanaan yang cakap dan tatakelola yang baik dalam pelaksanaannya. Dalam kasus Indonesia, masih ada mismatch yang cukup serius antara kebutuhan perencanaan dan pengambil keputusan dengan alokasi dan ketersediaannya di tingkat lokal.⁹

Ketiga, berkaitan dengan poin kedua, perlu perhatian terhadap aspek spasial dari kemiskinan. Perkembangan ilmu New Economic Geography dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan anti kemiskinan dari aspek spasial. Kebutuhan ini didasarkan fakta bahwa konsentrasi (*aglomerasi*) kegiatan ekonomi cenderung saling memperkuat (*self reinforcing*). Daerah kaya umumnya mempunyai dinamika yang intrinsik dan menghasilkan tingkat pengembalian dari modal dan tenaga kerja yang tinggi dibandingkan dengan daerah miskin. Logikanya, untuk daerah yang tertinggal seharusnya

⁹Ironisnya, praktek yang berlaku di Indonesia adalah hukuman yang diberlakukan kepada pegawai yang tidak cakap dan korup adalah memindahkan pegawai tersebut ke daerah terpencil dan tertinggal. Akibatnya kesenjangan daerah yang tertinggal yang lebih membutuhkan tenaga cakap akan menjadi lebih lebar. Serupa pula guru yang cerdas dan tenaga trampil paramedis umumnya terkonsentrasi di daerah yang perkotaan yang maju. Sementara daerah terpencil dan tertinggal harus mendapatkan pelayanan dari tenaga pendidik dan paramedis yang tidak cakap. Pola seperti ini akan menyebabkan disparitas pembangunan makin membesar. Reformasi birokrasi seharusnya menyentuh persoalan ini khususnya menyangkut masalah sistem insentif. At the end, people always repond to the incentive (Mankiw, Principle of Economics)

intervensi pemerintah merupakan solusinya. Tetapi intervensi yang eksekutif pada daerah yang tertinggal akan mengalihkan sumber daya yang terlalu banyak dari daerah yang menghasilkan tingkat pengembalian ekonomi yang lebih tinggi. Akibatnya, potensi *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan seringkali terjadi. Potensi *trade-off* ini bisa dihindari jika dampak pemerataan sebagai intervensi segera terealisasi, mengingat pemerataan mempunyai korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ilmu Ekonomi Geografi Baru memberikan arah bagaimana aspek spasial dari kebijakan anti kemiskinan (World Bank, 2006) yaitu:

- Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi tetapi dengan densitas kemiskinan rendah seperti NTT dan Papua umumnya tidak memiliki skala ekonomi yang muncul dari eksternalitas aglomerasi, sehingga cenderung tidak mempunyai dinamika ekonomi yang dapat menggerakkan perekonomian. Kebijakan anti kemiskinan yang dikembangkan untuk kelompok daerah ini adalah kebijakan yang mempunyai dampak langsung terhadap kemiskinan dan kebijakan yang meningkatkan keahlian yang dibutuhkan di daerah yang lebih dinamik (de Ferranti dkk, 2004). Kebijakan dana tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu kandidat kebijakan tersebut.
 - Daerah yang mempunyai tingkat kemiskinan yang rendah tetapi dengan densitas kemiskinan tinggi seperti di Jawa dan Bali serta daerah perkotaan, dimana kekuatan aglomerasi sudah eksis, kebijakan-kebijakan yang memperkuat pertumbuhan ekonomi mempunyai probabilitas yang tinggi untuk menjangkau keluarga miskin dan pada gilirannya akan mempunyai dampak terhadap penurunan kemiskinan. Kebijakan pentargetan pada kelompok akan mensuplemen *growth enhancing policies* untuk menjangkau kelompok miskin.
 - Untuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan densitas kemiskinan yang tinggi – yang umumnya terjadi di beberapa kabupaten di Jawa mempunyai potensi untuk mendapatkan manfaat dari proyek infrastruktur yang memiliki skala ekonomi dan potensi kebocoran yang rendah. Proyek pembangunan jalan desa misalnya merupakan contoh
-
-

dari kegiatan tersebut.

Pengalaman praktis menunjukkan penggunaan poverty maps yang di Indonesia dikembangkan Lembaga Penelitian SMERU bersama BPS dan Bank Dunia untuk mengidentifikasi sebaran penduduk miskin berdasarkan satuan wilayah kecil sangat berguna untuk mengefektifkan pentargetan berbagai program anti kemiskinan.

Pelajaran penting lainnya adalah pentingnya melengkapi kebijakan anti kemiskinan dengan kebijakan perlindungan sosial. Pengalaman krisis 2008/2009 memberikan bukti bahwa negara yang memiliki sistem perlindungan sosial akan mampu mengatasi dampak krisis terhadap rumah tangga miskin. *Hysteresis effect* pada rumah tangga miskin dalam bentuk putus sekolah dapat dihindari. Dalam konteks Indonesia, dinamika kemiskinan yang ditunjukkan oleh matriks transisi kemiskinan memberikan indikasi bahwa seandainya kita mempunyai sistem proteksi sosial yang lebih baik, kita dapat mencegah lebih banyak keluarga jatuh kedalam perangkap kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin sudah jauh berkurang. Namun demikian perlu digaris bawahi pula, pergerakan penduduk yang dinamis ini sebetulnya menyulitkan proses pentargetan dalam program anti kemiskinan. Penduduk yang tercatat sebagai penduduk miskin pada saat program diluncurkan akan secara mudah tercatat sebagai bukan miskin pada saat evaluasi dilakukan pada tahun mendatang. Dan sebaliknya, penduduk yang bukan miskin dapat jatuh miskin pada saat survey tahun berikutnya. Oleh karenanya, disain program mulai dari cara pentargetan harus dilakukan secara terukur. Alternatif lain adalah dengan mendisain program berdasarkan preferensi konsumen dibandingkan dengan berdasarkan eligibilitas yang sarat dengan kebutuhan administrasi. Program semacam ini menuntut desain program yang tidak mendorong penduduk yang tidak memenuhi syarat (*eligible*) ikut berpartisipasi dalam program. Misalnya, program padat karya yang didesain pada daerah kantong kemiskinan sebaiknya upah yang dibayar sedikit di bawah upah pasar. Contoh lain adalah program penjualan beras kepada keluarga miskin dimana kualitasnya di bawah rata-rata konsumsi masyarakat.

Sebagai salah satu catatan penting mengenai hubungan antara pertumbuhan

ekonomi dan perubahan kemiskinan tidaklah linear dan mulus dan sering terjadi perubahan yang sangat tajam karena adanya pengaruh guncangan internal dan eksternal. Dampak asimetrik antara pertumbuhan pendapatan dengan kemiskinan selama siklus bisnis, cenderung berdampak besar dan lama bagi golongan miskin. Penurunan pendapatan perkapita cenderung memiliki efek negatif bagi orang miskin, sedangkan kenaikan sebesar penurunan tersebut tidak akan memperbaiki keadaan seperti semula. Dampak asimetri ini juga terlihat dari perbedaan elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap masing-masing kelompok rumah tangga.

Dimensi lain yang relatif baru adalah menyangkut dampak krisis terhadap keluarga miskin. Pengalaman Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa dampak krisis ekonomi dirasakan oleh kelompok miskin dan non-miskin, tetapi kelompok miskin hanya memiliki sedikit pilihan untuk memitigasi (*coping mechanism*) dampak negatif dari krisis ekonomi. Jika pasar modal domestik bersifat sempurna dan guncangan dalam perekonomian bersifat sementara, maka seluruh pelaku ekonomi akan dapat melakukan akses terhadap pasar modal untuk menjaga pola konsumsi dan kesejahteraan mereka (*smoothing consumption*). Tetapi pada kenyataannya pasar modal dan pasar asuransi bersifat tidak sempurna (*incomplete*) dan tersegmentasi dan secara umum kelompok miskin hanya memiliki sedikit akses ke pasar tersebut. Orang miskin menjadi lebih terkena dampak, karena pendapatan dan tabungannya sangat rendah atau hanya cukup sekedar untuk bertahan hidup. Krisis dan resesi akan berdampak negatif terhadap kesehatan, sekolah dan masalah gizi kelompok miskin dan hampir miskin. Gejolak dari pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketidakpastian dan resiko bagi para investor, dimana kecenderungan ini akan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi dan pada jangka panjang akan memperlemah prospek pengentasan kemiskinan.

III . Stabilitas Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan: Peran Stabilitas Harga Sama Pentingnya dengan Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas Ekonomi Makro atau Stabilitas Harga mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui beberapa saluran yaitu terkait dengan (i) pengaruhnya

Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan

terhadap pertumbuhan ekonomi, (ii) dampak distribusinya terhadap masing-masing kelompok rumah tangga serta (iii) implikasi terhadap penyusunan kebijakan anti kemiskinan itu sendiri.

Pertama, berkaitan dengan hubungan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang masih kontroversial, karena hubungannya yang dapat positif atau negatif khususnya pada saat inflasi berada dalam wilayah inflasi rendah. Ambiguitas dari pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan secara teoritis oleh kompleksitas hubungan keduanya.

Teori Pertumbuhan Ekonomi mengindikasikan bahwa inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pengaruhnya terhadap tingkat akumulasi faktor-faktor produksi atau total *factor productivity* (Montiel, 2003). Tingkat akumulasi faktor produksi akan terpengaruh akibat uang dan kapital yang pada dasarnya merupakan substitute asset. Dalam hal ini, kenaikan tingkat inflasi akan mendorong pelaku ekonomi menempatkan asetnya dalam kapital dibandingkan mengakumulasi uang tunai (*hoarding*), sehingga pada giliran inflasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di lain pihak, inflasi berlaku seperti pajak terhadap kapital sehingga kenaikan inflasi sama saja dengan kenaikan kapital. Inflasi juga meningkatkan ketidakpastian sehingga menyulitkan entrepreneur dan pelaku ekonomi untuk melakukan perencanaan yang pada gilirannya akan menunda keputusan investasinya. Inflasi juga akan mendorong kenaikan tingkat bunga nominal yang bukan hanya akan meningkatkan biaya modal kerja tetapi juga biaya investasi. Ketidakpastian juga akan tercermin pula dalam pasar valuta asing yang pada gilirannya mendorong pelarian modal. Lebih jauh lagi, inflasi yang tinggi mencerminkan ketidakbecusan pemerintah (Fischer, 1993). Jadi, dari jalur akumulasi ini terdapat dua pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang berbeda.

Hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga dapat terjadi melalui penurunan total factor productivity. Saluran ini dikenal dengan nama *efficiency channel*. Inflasi yang tinggi meningkatkan kebutuhan untuk mengubah harga yang pada gilirannya meningkatkan biaya transaksi bagi perusahaan (*menu costs*) dan menurunkan tingkat pemegangan uang tunai oleh konsumen (*shoe-leather costs*). Inflasi yang tinggi menyebabkan

distorsi dalam informasi.

Jawaban dari hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi semata-mata terletak pada hasil empiris. Regresi antar negara dengan menggunakan sampel yang relatif besar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi dan produktivitas mempunyai korelasi positif dengan stabilitas ekonomi makro. (Easterly dan Kray, 1999). Adres dan Hernado (1997) menunjukkan berdasarkan studi di negara OECD pada periode 1960-92 bahwa tingkat inflasi rendah atau moderat sekalipun mempunyai dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mempunyai dampak yang permanen berupa penurunan pendapatan per kapita. Penelitian yang dikemukakan oleh Barro (1994) dengan menggunakan data panel 1960-1990 dan melibatkan 100 negara, yang menunjukkan bahwa, ceteris paribus, kenaikan 10 persen dalam inflasi menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,025 persen per tahun. Temuan Barro menunjukkan bahwa tingkat inflasi dibandingkan variabilitas inflasi yang lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. World Bank dalam monograf yang berjudul ” *Economic Growth in 1990s: Learning of a Decade Reform* ” menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi makro yang stabil biasanya berasosiasi pula dengan “ *fiscal solvency and sustainability, a monetary policy stance consistent with a low stable rate of inflation, and a robust exchange rate regime that avoids both systematic currency misalignment and excessive volatility in the real exchange rate* ”. Walaupun sukar untuk membuktikan secara langsung arah hubungan kausalitasnya – apakah stabilitas kebijakan akan mempengaruhi stabilitas ekonomi makro atau sebaliknya -, beberapa studi membuktikan bahwa instabilitas ekonomi makro mempunyai asosiasi yang kuat dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang rendah. Tanpa stabilitas ekonomi makro, pelaku ekonomi enggan menempatkan sumber dayanya di suatu negara. Hal ini dibuktikan oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa bersama-sama dengan faktor-faktor lain seperti laju pertumbuhan ekonomi masa lalu, tingkat bunga riil dan kredit), investasi swasta secara signifikan dan secara negatif dipengaruhi oleh ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi makro – dalam hal ini diwakili oleh tingkat inflasi dan nilai tukar dan variabilitasnya. (lihat misalnya Ramey dan Ramey, 1995). Inflasi bukan hanya menurunkan tingkat investasi tetapi juga efisiensi penggunaan faktor produksi. Benefit menurunkan tingkat inflasi sangat besar (Adres

dan Hernando, 1997). Adres dan Hernando menyimpulkan “*effort to keep inflation under control will sooner or later pay in terms of better long-run performance and higher per capita income*”

Inflasi yang tinggi menyebabkan suatu negara kehilangan daya saing karena inflasi yang tinggi akan mempengaruhi nilai tukar riil suatu negara. Erosi daya saing akan mempengaruhi kinerja sektor tradable. Jika sektor tradable menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, penurunan daya saing ini akan mempunyai implikasi pada penciptaan lapangan kerja dan tingkat pengangguran. Penciptaan lapangan kerja tentu akan mempengaruhi tingkat kemiskinan mengingat “*labor*” merupakan aset utama dari orang miskin. Ekspansi sektor *tradable* ini seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya merupakan pendorong (driver) dari penurunan kemiskinan Indonesia di era 1990an dan – walaupun masih dalam bentuk spekulatif – penurunan daya saing industri manufaktur selama pasca reformasi mempunyai asosiasi terhadap perlambatan laju penurunan tingkat kemiskinan. Hubungan antara inflasi dan daya saing industri manufaktur serta tingkat kemiskinan ini ditemukan pula oleh Cardoso (1992) untuk kasus negara Amerika Latin.

Dampak Inflasi terhadap Kelompok Miskin cenderung lebih besar: Benefit Penurunan Inflasi adalah Ramah Kelompok Miskin (*Pro Poor*)

Inflasi pada dasarnya identik dengan pajak yang regresif dan arbiter, dimana bebannya dialami secara disproporsional oleh kelompok berpendapatan rendah. Mengutip istilah yang dipakai oleh Easterly dan Fischer (2001):

“*...inflation is the cruelest tax of all and is often interpreted as meaning the claim hurts the poor relatively more than the rich*’.

Ada dua alasan dibaliknya yaitu pertama, rumah tangga miskin umumnya menempatkan kekayaannya dalam bentuk uang tunai (cash) dibandingkan dengan aset finansial yang memiliki tingkat pengembalian (*interest bearing asset*). Inflasi akan secara langsung menurunkan nilai riil dari kekayaannya yang pada gilirannya mengurangi tingkat konsumsi (atau dikenal pula dengan *Tobin Effect*). Kedua, kemampuan kelompok berpendapatan

rendah dalam mengelola dan memproteksi nilai riil dari pendapatan dan aset dari inflasi umumnya lebih rendah dibandingkan kelompok “*the better off*”. Konsekuensinya kenaikan inflasi akan menimbulkan erosi terhadap pendapatan (gaji) dan aset keuangan lain lebih besar pada keluarga miskin dibandingkan dengan keluarga bukan miskin.

Inflasi yang rendah memberikan kemudahan bagi kelompok miskin untuk mengelola resiko-resiko ekonomi akibat keterbatasan akses dan pengetahuan kelompok miskin terhadap institusi proteksi seperti asuransi dan kredit. Akibatnya, bagi kelompok rumah tangga miskin, dampak inflasi yang menimbulkan ketidakpastian yang menyebabkan mereka enggan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk investasi sumber daya manusia maupun investasi bisnis. Rumah tangga miskin umumnya tergolong memiliki tingkat *risk averseness* yang tinggi, karena tidak mempunyai akses kepada sumber keuangan yang memadai atau aset yang terbatas. Akibatnya mereka umumnya memiliki cash ratio (terhadap pendapatan) yang lebih tinggi sebagai bagian dari motif berjaga-jaga (*precautionary motive*). Mereka juga enggan melakukan kegiatan investasi baru yang mengandung berisiko. Dalam kaitan ini, inflasi akan meningkatkan resiko yang lebih tinggi dan menyebabkan rumah tangga miskin menjadi tidak terlibat dalam proses pertumbuhan ekonomi. Risk averseness ini juga mempengaruhi keputusan investasi rumah tangga miskin. Mereka lebih mementingkan investasi yang berdampak sekarang dan jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang seperti pendidikan. Mengingat tingkat pengembalian di pasar tenaga kerja berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan, keengganan rumah tangga miskin melakukan investasi jangka panjang bukan hanya menyebabkan kegagalan mereka untuk ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperburuk distribusi pendapatan yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kemiskinan absolut. Perkembangan tingkat distribusi pendapatan di negara-negara Amerika Latin menjadi bukti keterkaitan antara investasi pendidikan dan tingkat kemiskinan serta distribusi pendapatan.

Lebih jauh lagi, pada saat terjadinya goncangan baik yang bersifat individual (*idiosyncratic shocks*) maupun lokal dan global (*covariate shocks*), inflasi akan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi – termasuk

kepada rumah tangga miskin yang jarang menggunakan uang tunai untuk keperluan transaksi. Rumah tangga miskin biasanya akan mengatasi krisis yang dialaminya dengan memotong biaya investasi jangka panjang seperti memberhentikan anaknya dari sekolah dan atau mengurangi kualitas gizi makanan di rumah tangganya. Pengalaman ini terjadi pada saat krisis tahun 1998 dimana rumah tangga miskin mengatasi goncangan dengan memberhentikan anak dari sekolah akibat El Nino dan krisis ekonomi yang memicu inflasi hingga 70% dan sekaligus penurunan pendapatan per kapita lebih dari 10%. Respons keluarga miskin seperti ini dikenal dalam literatur ekonomi sebagai “*hysteresis*”. Kejadian ini terulang pada saat krisis pangan 2008 di beberapa negara di Afrika (Grosh, 2008)

Ada yang berpendapat bahwa rumah tangga pertanian dimana mereka bertindak sebagai produsen dan sekaligus konsumen, kenaikan harga tidak selalu berasosiasi dengan kenaikan tingkat kemiskinan, karena sebagai produsen mereka akan diuntungkan dengan kenaikan harga pangan. Bahkan sebagai buruh tani pun diuntungkan karena kenaikan harga pangan akan ditranslasikan pada kenaikan upah buruh tani yang menguntungkan semua penduduk desa yang bukan petani produsen. Secara teoritis, memang dampak kenaikan harga pangan tergantung pada posisi keluarga miskin apakah menjadi net producers atau net consumers. Jika sebagai net producer, mereka akan diuntungkan tetapi sebagai net consumer, kenaikan harga, *ceteris paribus*, akan meningkatkan beban dan menurunkan pendapatan riil mereka. Jadi, dampak agregatnya tergantung pada apakah yang lebih dominan sebagai *net producers* atau *net consumers*. Jika net producers yang dominan, niscaya kenaikan inflasi akan identik dengan penurunan tingkat kemiskinan dan sebaliknya jika net consumer yang dominan akan berakibat pada kenaikan tingkat kemiskinan.¹⁰

Inflasi juga mempengaruhi kebijakan kemiskinan. Fluktuasi harga bukan hanya meningkatkan biaya jaring pengaman sosial tetapi juga menyulitkan proses penyusunan kebijakan anti kemiskinan. Mengingat ketidakstabilan harga akan mempengaruhi *fiscal sustainability*, keberlanjutan anggaran program kemiskinan akan terganggu jika anggarannya tidak berkelanjutan.

¹⁰Lihat misalnya Deaton (1997) untuk teori dampak distributif dari perubahan harga (pangan).

Kebijakan Ekonomi Makro

Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan

Apalagi jika potensi elite capture-nya cukup kuat di suatu negara, pemotongan anggaran akan terjadi pertama kali justru pada anggaran yang menyentuh keluarga miskin.

Bukti empiris tentang hubungan inflasi dengan kemiskinan belum banyak. Pada awalnya sebagian analisis dilakukan dengan menggunakan data di Amerika Serikat dimana ditemukan hubungan yang kuat antara peningkatan inflasi dengan kemiskinan. Di negara berkembang, studi yang dilakukan Cardoso (1992) menemukan bahwa *inflation tax* tidak mempengaruhi rumah tangga miskin karena mereka tidak memegang uang tunai dalam jumlah yang signifikan. Tetapi, Cardoso menemukan bahwa inflasi yang tinggi mempunyai asosiasi dengan penurunan upah riil di negara Amerika Latin. Sementara Rezende (1998) menemukan korelasi yang kuat antara inflasi dengan distribusi pendapatan di Brazil. Distribusi pendapatan memburuk ada saat inflasi meningkat dan sebaliknya menurun bersamaan dengan keberhasilan stabilisasi inflasi tahun 1994-96. Datt dan Ravallion (1996) menemukan menggunakan data panel antar negara bagian di India bahwa negara bagian yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi.

Simulasi sederhana dengan menggunakan regresi terpisah antara inflasi dan komponennya dan kemudian diaplikasikan dengan menggunakan data Susenas menunjukkan hasil yang menarik yaitu: (i) setiap 1% kenaikan *cost of poverty basket inflation*¹¹, ceteris paribus, akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,5% poin kemiskinan. (ii) setiap kenaikan 10% kenaikan indeks harga makanan akan menaikkan inflasi sebesar 3.5 persentase poin. (iii) setiap kenaikan 10 persen harga beras akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 1,3 poin persentase.

Terkait kenaikan harga beras, berbagai studi cenderung mengarah pada kesimpulan bahwa inflasi dan kenaikan harga beras berasosiasi dengan kenaikan tingkat kemiskinan. Ikhsan (2005), McCoulough (2009) dan Warr dan Jusuf (2009) menemukan kenaikan harga pangan berasosiasi

¹¹ Dalam simulasi ini tidak digunakan IHK karena timbangan IHK yang merefleksikan konsumsi rata-rata penduduk Indonesia terutama di perkotaan dengan biaya hidup keluarga miskin berbeda. Akibatnya dampak inflasi sangat berbeda tergantung pada sumber kenaikan harga komoditasnya. Penggunaan inflasi untuk memproyeksikan garis kemiskinan akan cenderung tidak akurat.

dengan kenaikan kemiskinan. Karena sekitar 96% penduduk kota adalah net consumers serupa pula 52% penduduk desa, sehingga penduduk miskin akan terkena dampak terbesar akibat kenaikan harga beras. Tidak mengherankan kemudian setiap kenaikan 10% harga beras identik dengan kenaikan 1%-1,3% point penduduk miskin atau dengan kata lain lebih dari dua juta penduduk Indonesia jatuh miskin akibat kenaikan harga beras 10%. Kenaikan harga beras juga mengandung dimensi distribusi yang tidak diinginkan yaitu: (i) terjadi transfer pendapatan dari penduduk luar Jawa kepada penduduk Jawa; (ii) terjadi transfer dari penduduk kota kepada penduduk desa; (iii) tetapi transfer pendapatan tersebut berasal dari penduduk di propinsi miskin kepada penduduk propinsi kaya atau penduduk miskin kepada penduduk kaya. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beras bukan hanya akan meningkatkan kemiskinan tetapi juga akan memperburuk distribusi pendapatan yang tercermin pula peningkatan yang monotonik (monotonically increasing) dalam dampaknya terhadap jumlah orang miskin (terrefleksikan dalam headcount index), kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan intensitas kemiskinan. Temuan yang sama juga dikemukakan oleh Son (2009) dalam kasus Philipina.

IV.Sumber Inflasi di Indonesia

Setelah menunjukkan hubungan yang erat antara inflasi dan tingkat kemiskinan, kini jelas upaya percepatan penurunan tingkat kemiskinan mensyaratkan penurunan tingkat inflasi. Penurunan tingkat harga sama pentingnya dengan peran pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu upaya menurunkan inflasi seharusnya menjadi salah satu *core* dari kebijakan anti kemiskinan di Indonesia. Untuk menjalankan kebijakan anti inflasi kita juga perlu mengetahui sumber dari inflasi mengingat seperti dikatakan sebelumnya terdapat potensi *trade-off* antara dua pilar penting penurunan kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi harga.

Berikut ini beberapa fakta tentang inflasi di Indonesia. Pertama, setelah berhasil menurunkan inflasi dari *hyperinflation* pada 1960-an menuju moderate inflation, Indonesia masih belum mampu menurunkan inflasi ke tingkat yang sepadan dengan tingkat inflasi regional. Inflasi di Indonesia bukan hanya lebih tinggi dibandingkan dengan negara OECD tetapi juga

Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan

negara-negara lain. Sebagai gambaran, rata-rata inflasi Indonesia pada periode 2000-2009 mencapai 8,4%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Vietnam (6,1 %) dan India (5,6 %), dan jauh lebih tinggi jika kita bandingkan dengan Malaysia (2,2%) dan China (1,9%).

Kedua, disamping tingkat inflasi yang lebih tinggi, karakter inflasi di Indonesia juga cenderung lebih *volatile*. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya standard deviasi inflasi bulanan Indonesia, yang mencapai sekitar 4%. Sementara, volatilitas inflasi tiga negara tetangga kita (Malaysia, Filipina dan Thailand) berkisar di 2%.

Menelaah lebih lanjut dengan melakukan disagregasi inflasi, kita akan menemukan dua fakta berikutnya yakni inflasi makanan yang cenderung menjadi lebih dominan dan inflasi di pedesaan yang lebih tinggi dibandingkan inflasi di perkotaan. Inflasi makanan (*food inflation*) telah menjadi sumber inflasi yang persisten dalam beberapa tahun terakhir. Inflasi makanan sempat mengalami penurunan pada periode 2000-2004 namun sejak tahun 2004 menjadi sumber inflasi utama dan cenderung lebih *volatile* dibandingkan dengan kelompok yang lain.¹²

Fakta kelima adalah kenyataan bahwa inflasi yang berhubungan dengan keranjang konsumsi rakyat miskin lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi IHK, terutama dalam kurun waktu pasca 2003. Inflasi yang dirasakan pada kelompok rakyat miskin yang lebih tinggi dari inflasi IHK ini tentu amat merisaukan. Dengan pendapatan yang rendah, kenaikan harga akan semakin memperburuk daya beli rakyat miskin. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi pula kesenjangan antara kelompok yang mampu dengan rakyat miskin.

Keenam, volatilitas inflasi antar daerah juga tergolong tinggi. Volatilitas harga beras di Sumatera sekitar 10% lebih besar daripada di Jawa. Sementara, dibandingkan dengan di pulau Jawa, volatilitas di pulau Kalimantan tercatat hampir 2 kali lipat.

¹² Perbedaan inflasi kota dan desa sangat boleh jadi lebih disebabkan masalah metodologi terutama masalah pencatatan dan sampling error.

Pengetahuan tentang sumber inflasi di Indonesia sudah sangat memadai. Puluhan studi tentang inflasi di Indonesia telah dilakukan. Meski dilakukan dengan pendekatan dan metodologi yang berbeda, temuannya cenderung tidak banyak berbeda. Pertama, inflasi di Indonesia bukan hanya fenomena moneter tetapi juga fenomena struktural. IMF (2006) menyimpulkan bahwa tingginya inflasi di Indonesia dibanding negara lain di kawasan adalah berbagai faktor struktural seperti persistensi inflasi dan kestabilan politik yang dikombinasikan dengan kebijakan moneter yang cenderung ekspansif dan depresiasi rupiah. Dalam studi OECD terbaru (2010) disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi secara signifikan Indonesia adalah nilai tukar dan kesenjangan output (*output gap*). Walaupun mengidentifikasi kesenjangan output – yang merefleksikan kelebihan permintaan, studi OECD menunjukkan pula tingginya penyebab yang tidak bisa diidentifikasi dibandingkan dengan inflasi di negara-negara lain di Asia Tenggara. Variabel yang tidak bisa diidentifikasi sangat boleh jadi berhubungan dengan faktor-faktor yang bersifat struktural.

Kedua, penyebabnya berbeda antara satu periode dengan periode sebelumnya. Pangestu (1986) dan Hermanto (1991) menunjukkan bahwa di era 1970an hingga 1990an, faktor sisi permintaan lebih berperan melalui monetisasi penerimaan migas yang berakibat pada peningkatan defisit anggaran dan pada gilirannya peningkatan uang beredar.

Ketiga, Machmud (2007) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang inflasi barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable goods*) lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik seperti harga upah. Sementara, untuk barang-barang tradable, faktor-faktor yang penting adalah nilai tukar dan harga dunia.

Keempat, faktor struktural berperan besar dalam pembentukan inflasi. Affandi (2010) menunjukkan bahwa kontribusi biaya transportasi pada pembentukan inflasi jangka panjang dari sisi penawaran (*mark-up cost*) mencapai hingga 40%. Hal ini diperkuat pula dengan analisis regresi sederhana yang memperlihatkan bahwa waktu yang ditempuh dari desa ke kecamatan secara signifikan mempengaruhi pembentukan harga beras. Uraian di atas menunjukkan secara jelas, upaya menurunkan inflasi tidak

bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan kebijakan moneter. Sepanjang permasalahan struktural belum diselesaikan, kebijakan moneter akan sulit untuk menurunkan inflasi pada tingkat yang lebih rendah. Kerangka kebijakan inflation targeting yang kini diterapkan Bank Indonesia juga tidak cukup. Diperlukan upaya-upaya dan terobosan dalam bidang struktural yang berada dalam kewenangan pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

V. Konektivitas Domestik sebagai Kebijakan Ramah Pertumbuhan dan Ramah Inflasi Rendah

Tanpa mengabaikan faktor struktural lain dan moneter yang tidak kalah penting, saya berpendapat perbaikan konektivitas domestik merupakan kebijakan yang bekerja dalam dua arah sekaligus.

Dari sisi penawaran, perbaikan konektivitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terciptanya infrastruktur yang baik seperti jalan, listrik, rel kereta api, dan pelabuhan akan memberikan peningkatan kapasitas ekonomi domestik. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi tentunya akan mempermudah perpindahan orang dan barang, yang pada gilirannya akan memberikan akselerasi kegiatan ekonomi.

Pentingnya konektivitas ditunjukkan pula oleh serangkaian bukti empiris. Survey iklim investasi pedesaan 2006 yang dilakukan Kantor Menko Perekonomian dan Bank Dunia dan serangkaian riset yang dilakukan oleh The Asia Foundation dan LPEM Universitas Indonesia menunjukkan biaya transaksi di daerah tergolong tinggi sehingga menimbulkan erosi terhadap daya saing produk Indonesia baik melalui perdagangan antar daerah maupun di pasar global. Produk pertanian terutama produk tanaman dengan nilai tambah tinggi cenderung lebih dan makin sensitif terhadap biaya transaksi sehingga walaupun sudah relative efisien di tingkat petani (on farm) tetapi menjadi sangat mahal akibat tidak efisiennya sistem logistik nasional. Penyebabnya terjadi secara simultan atau kadang secara individual adalah (i) ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas; (ii) tidak efisiennya sistem logistik nasional dan (iii) banyaknya regulasi yang berlebihan di tingkat daerah dan nasional. Percepatan

pembangunan infrastruktur dan pengembangan system logistik nasional serta deregulasi ekonomi akan bukan hanya mengurangi biaya transaksi tetapi akan memberikan insentif tambahan bagi terciptanya konektivitas antar daerah guna mendorong terjadinya integrasi ekonomi nasional.

Jadi, melalui integrasi perekonomian, produksi barang dan jasa akan meningkat dalam jangka pendek. Sementara dalam jangka panjang, konvergensi pendapatan dan standar hidup penduduk akan terwujud. Pembangunan infrastruktur pedesaan akan mengurangi biaya hidup penduduk pedesaan. Penggunaan infrastruktur yang modern akan mengurangi ketergantungan penduduk pedesaan pada infrastruktur tradisional yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Misalnya untuk listrik. Ketersediaan listrik akan mengurangi biaya energi sebesar 4-5 kali sehingga memungkinkan petani untuk mengalokasi pengeluaran yang dihemat untuk perluasan kegiatan produksi atau penggunaan yang lain-lain.

Terdapat tiga hal penting menyangkut konektivitas domestik. Pertama, dalam mencapai pertumbuhan yang maksimal harus tersedia sarana dan prasarana yang menghubungkan berbagai pusat pertumbuhan (*connecting growth poles*). Kedua, agar tercapai pertumbuhan yang lebih merata, harus tersedia konektivitas antar daerah, berupa berbagai sarana transportasi (intermodal transportation) maupun jaringan sistem logistik yang efisien. Konektivitas yang tersedia berperan untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah yang tertinggal. Ketiga, untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, harus pula tersedia konektivitas antara daerah yang terpencil (*remote areas*) melalui pengembangan infrastruktur dasar.

Sementara itu, dari sisi permintaan, meningkatnya kapasitas perekonomian melalui perbaikan konektivitas domestik akan mendorong penurunan tingkat inflasi. Hal ini disebabkan karena konektivitas domestik akan mengurangi disparitas harga dan dengan sendirinya mengurangi volatilitas harga dan inflasi antar-daerah.

Saat ini, pusat kegiatan ekonomi Indonesia berada di daerah perkotaan, khususnya di pulau Jawa. Keterbatasan transportasi antar daerah telah menyebabkan enggannya industri untuk menjauh dari pusat kegiatan

Kebijakan Ekonomi Makro **Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan**

ekonomi. Padahal, dengan membaiknya sarana dan prasarana konektivitas domestik, industri akan memiliki akses yang lebih baik kepada pusat produksi maupun kepada pasar dimana sebagian besar konsumen berada. Hal ini akan berdampak pada rendahnya harga komoditas dan barang-barang konsumsi, yang kemudian akan memperbaiki daya saing di tingkat internasional.

Gambaran buruknya konektivitas domestik saat ini dapat direkam dari berbagai informasi anekdotal. Biaya pengiriman satu kontainer dari Padang ke Jakarta adalah US\$ 600, padahal ongkos satu kontainer dari Jakarta ke Singapura, dengan jarak yang lebih jauh, hanya sekitar US\$ 185. Membanjirnya buah jeruk mandarin dari luar negeri di pasar domestik dibanding jeruk Pontianak tidak terlepas dari lebih murah ongkos pengiriman dari China ke Jakarta daripada Pontianak ke Jakarta.

Harus diingat bahwa: pertama, elemen dari konektivitas tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga menyangkut infrastruktur lunak. Reformasi regulasi baik menyangkut penyederhanaan regulasi di tingkat pusat maupun di daerah dan melengkapi regulasi yang diperlukan sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur fisik. Kedua, adanya bukti komplementaritas dari jenis infrastruktur dan kebijakan suplemennya mengindikasikan bahwa dalam memperbaiki konektivitas domestik tidak bisa sekedar dilakukan dengan melakukannya secara parsial. Misalnya tidak ada gunanya membangun jalan jika pungutan baik sifatnya resmi maupun liar masih merajalela. Tidak ada gunanya membangun pelabuhan, jika sistem pengaturan rute dan izin pelayaran masih ruwet dan penuh dengan ketidakpastian.

VI. Rekapitulasi

Uraian di atas menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan menuntut terjaganya fundamental ekonomi makro, utamanya pengendalian tingkat harga. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan stabilitas harga memegang peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Harga umum yang stabil akan mempunyai dampak yang lebih dari

proposional terhadap penduduk miskin dibandingkan dengan penduduk yang tidak miskin. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan aset dan profil risiko yang dihadapi oleh penduduk miskin. Manajemen kebijakan pengendalian inflasi ini makin penting dewasa ini bagi penanggulangan kemiskinan karena kecenderungan inflasi yang berkaitan dengan biaya hidup rumah tangga miskin cenderung lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi umum. Pola yang demikian bukan hanya akan mendorong kenaikan angka kemiskinan, *ceteris paribus*, tetapi juga berdampak pada memburuknya distribusi pendapatan.

Pengendalian inflasi di Indonesia tidak bisa dilakukan sekedar dengan kebijakan moneter. Inflation targeting yang dilakukan oleh Bank Indonesia memang telah membantu menurunkan inflasi tetapi masih jauh di atas target yang diinginkan. Hal ini disebabkan persoalan inflasi di Indonesia disebabkan pula oleh faktor-faktor struktural.

Salah satu faktor struktural yang menyebabkan persistensi inflasi yang relatif tinggi berkaitan dengan masih lemahnya konektivitas domestik yang telah menyebabkan perekonomian Indonesia berbiaya tinggi. Struktur ekonomi yang berbiaya tinggi tersebut ditandai dengan kekakuan harga (*sticky prices*) yang asimetri dimana harga cenderung mudah naik tetapi sukar untuk turun.

Oleh karenanya perbaikan konektivitas domestik merupakan kebijakan yang bukan hanya dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempunyai potensi untuk menurunkan tingkat harga dan volatilitasnya (inflasi) yang pada gilirannya akan membantu percepatan upaya penanggulangan kemiskinan. Yang harus diingat adalah elemen konektivitas domestik bukan hanya terbatas pada infrastruktur fisik tetapi juga mencakup infrastruktur lunak. Oleh karenanya, keduanya harus dikembangkan secara simultan mengingat adanya komplementaritas kebijakan dimana tingkat pengembalian ekonomi (*economic return*) kebijakan yang dilakukan secara bersama-sama dan simultan akan lebih tinggi dibandingkan jika dilaksanakan secara parsial.

VII Penutup

Izinkan lah saya pada bagian penutup pidato pengukuhan ini menyampaikan beberapa ucapan syukur dan terimakasih, Yang pertama terutama rasa syukur kepada Allah SWT yang atas rahmatNya saya dapat mencapai titik pencapaian akademik yang relatif cepat. Dalam perenungan, saya merasa hidup saya khususnya dalam bidang akademik ini sangat dimudahkan oleh Nya. Jenjang pendidikan yang saya tempuh selalu tepat waktu dan praktis selalu tanpa hambatan yang berarti. Setiap ada hambatan dalam menyelesaikan karir akademik, selalu ada jalan yang ditunjukkan olehNya.

Karir akademik saya tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan banyak pihak. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Prof M. Arsjad Anwar yang telah memberikan bimbingan dan pengertian dasar tentang ilmu Ekonomi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penghargaan secara khusus ingin saya sampaikan kepada para mentor saya yang lain: Profesor Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Profesor Salim Rashid dari University of Illinois, Profesor Samuel Morley dari Vanderbilt University, almarhum Dr Sjahrir, Dr Darmin Nasution, Profesor Iwan Jaya Azis, Prof Soedradjad Djiwandono dan Prof Anwar Nasution atas bimbingannya selama ini. Tidak lupa saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Profesor Boediono yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga khususnya dalam mengimplementasikannya dalam kebijakan sehari-hari.

Penghargaan secara khusus ingin saya sampaikan kepada sahabat dan sekaligus” kakak saya” Dr Sri Mulyani Indrawati yang juga menjadi mentor sejak hari pertama saya menginjak kaki di FEUI awal Agustus 1983. Mbak Anik bersama-sama Dr Mustopadidjaja AR ikut memperjuangkan beasiswa S3 dari OTO-Bappenas tahun 1994. Langkah besar ini telah menentukan karir akademik dan non akademik lain sayasekarang dan masa depan.

Perjalanan menuju penghargaan akademik tertinggi ini pun ternyata tidak terlalu mudah. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada beberapa pihak yang sangat membantu proses penyelesaian guru besar ini. Penghargaan ingin saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan

Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan

Nasional Prof Mohamad Nuh yang bukan hanya atas kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan tetapi juga secara langsung bersama-sama dengan Wamendiknas Prof Fazli Djalal dan Dirjen Pendidikan Tinggi Prof Djoko Santoso dan Seswapres Drs Tursandi Alwi MH membantu menghilangkan hambatan birokrasi dalam penyelesaian surat keputusan Guru Besar ini. Selain itu, terima kasih yang tak terhingga kepada Rektor dan wakil Rektor Universitas Indonesia beserta seluruh jajarannya atas semua bantuannya mulai dari proses pengukuhan hingga terselenggaranya upacara pengukuhan hari ini.

Rasa terima kasih yang dalam juga ingin saya sampaikan kepada Dewan Guru Besar FEUI yang telah berkenan menerima saya menjadi anggota. Penghargaan terutama kepada Prof Prijono Tjptoherianto, Prof Susiyati B Hirawan dan Prof Sumarlin yang telah memberikan perhatian khusus bagi saya untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi. Ucapan terima kasih saya ingin saya sampai secara khusus kepada tim penilai: Prof M. Arsjad Anwar, Prof B.S Mulyana dan Prof Miranda Goeltom dan Team Reviewer: Dr Jossy P.Moeis dan Dr Arianto Patunru yang telah bersedia menghabiskan waktu yang berharga untuk memeriksa dan menilai berkas yang saya ajukan. Dalam proses ini penyelesaian syarat akademis ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Mas Sunardji, Mas Sunarto, Eliza dari Subbag SDM FEUI, Kiki, Hafiz, Endang dan Nanin dari Departemen Ekonomi FEUI yang telah membantu di balik layar.

Saya ingin secara khusus menghaturkan terimakasih kepada sahabat saya Prof Robert Arthur Simanjuntak baik sewaktu menjabat Kepala Departemen Ekonomi maupun sesudahnya, yang tidak henti-hentinya mendorong saya untuk segera melengkapi persyaratan administrasi guru besar ini.

Penghargaan yang sama saya sampaikan kepada Dekan FEUI, mantan Dekan serta wakil (pembantu) Dekan, pimpinan lembaga di FEUI dan seluruh jajarannya atas kerjasama yang erat selama ini baik sebagai pengajar maupun pimpinan di LPEM.

Karir saya terbantu dengan persahabatan dari kawan-kawan saya baik dalam kehidupan pergaulan akademik maupun non akademik. Penghargaan

ini ingin saya sampaikan kepada para teman “bertengkar” sehari-hari yaitu: Dr M. Chatib Basri bersama Dr Rizal Mallarangeng. Banyak teman-teman yang lain, baik di FEUI khususnya di LPEM-FEUI, teman-teman eks FEUI khususnya angkatan 1983, teman-teman eks Vanderbilt Nashville 1990-91, eks Urbana-Champaign 1994-1998, Kantor Menko Perekonomian, PLN, Bakrie Brothers, Indosat, Danareksa, Kantor Setwapres dan lain-lain dimana kita saling berinteraksi dan saling mengisi. Tanpa ingin mengecilkan peran yang lain, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada senior (yang sebagian juga merupakan guru saya) dan sahabat saya: Dr Mari Pangestu, Dr Djunaedi Hadisumarto, Dr Jossy Moeis dan Yani, Dr Raksaka Mahi, Hera Susanti MSc, Faisal Basri MA, Prof Bambang Brodjonegoro, Dr HS Dillon, Prof Ine Ruky, Prof Sulastri Surono, Dr Sudarno Sumarto, Anton Gunawan, Wendi Damita, Mahendra Siregar MA, Bobby Ghafur, Irwan Syarkawi, Suyanti, Dr Monty Girianna dan Vina, Marwanto MA dan Mbak Yanti, Rizky Ferianto MA, Femmy Roeslan, Widyanti, Dr Djoni Sidarta, Muchlis Ali, Satya, Dr Fuad Rahmani, Dr Adityawan Chandra, Prof. Dr Ari Kuncoro, Dr Raden Pardede, Azis Armand dan Nina, Dr Komara Djaja, Anton Hermanto, Supramu Santosa, Dr Anggito Abimanyu, Dr Vivi Alatas, Dr Shubham Chauduri, Dr Martin Ravallion, Dr Jehan, DrYoichiro, Dr Bill Wallace, Dr Bambang Widiyanto, Dr Tirta Hidayat, Dr Komara Djaja, Prof Suahasil Nazara, Jopie Hidayat, Achmadi, Dr Setyo Dewo, Prof Sutan Remy, Achmadi, Dr Kuntoro Mangkusubroto. Secara khusus saya ingin menyampaikan terimakasih kepada sahabat saya Dr Lukita D. Tuwo yang selama lebih 5 tahun bersama-sama menghabiskan waktu di kelas, perpustakaan dan lapangan badminton baik di Nashville maupun Urbana-Champaign.

Kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh staf peneliti dan staf administrasi LPEM-FEUI yang merupakan lembaga yang membesarkan saya sejak menjadi asisten peneliti lepas hingga Kepala LPEM. Kepada teman-teman eks doktor – “mondok di kantor” sebagian adalah teman-teman di atas plus Roy Kuncoro Dadang Damhuri, dan Imam Rasyidi–memori kebersamaan itu tidak terlupakan.

Karir akademik saya tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan kolega, asisten dan kawan-kawan di BPS terutama Pak Rusman Heriawan, Dian

Pramono, Suprijanto yang membantu di atas kewajiban mereka yang telah membantu dalam menyusun begitu banyak hasil riset dan publikasi saya. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Arif Mahmud, Usman, Uka, Syarif, Teguh, Samsu, Ari Damayanti, Thia, Rizal Siddiq, Kadek, Vid Adrison, Denni Purbasari, Yoga Affandi yang telah banyak membantu pekerjaan saya dalam menulis laporan penelitian dan paper. Alangkah bahagianya saya, sebagian besar dari mereka telah menyelesaikan atau dalam proses menyelesaikan program S3-nya. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Bintoro, Rini, Betty, Susi dan Acong Satiman yang dulu hingga sekarang membantu saya sehari-hari urusan akademis ini.

Saya juga tergolong orang yang beruntung karena mendapatkan kesempatan berkarir “sampingan” baik di birokrasi dan sektor swasta. Kesempatan ini saya ingin ucapkan terimakasih kepada Ir Aburizal Bakrie yang telah pertamakali mengajak saya untuk hijrah ke pemerintahan. sebagai sebagai staf khusus beliau. Saya juga beruntung mendapatkan bos-bos – Pak Boediono, Pak Ical, dan Mbak Anik - yang memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan karir di pemerintah.

Acara ini dapat terselenggara dengan lancar berkat bantuan teman-teman di FEUI, Rektorat UI dan Biro Protokol Setwapres serta teman-teman Paspamres. Secara khusus saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Asty Setiautami dan Sapto serta Deddy Triharjanto yang mengkoordinasikan kegiatan ini di FEUI dan Protokol Setwapres.

Kesempatan ini juga saya ingin saya ucapkan penghormatan saya kepada ayahanda almarhum Mahyuddin Hasyim, yang tidak sempat melihat sendiri putranya menggapai cita-cita yang beliau inginkan. Selaku guru yang kemudian beralih menjadi birokrat, beliau menanamkan ukuran tunggal dan sederhana dari keberhasilan seorang guru adalah murid harus lebih pintar dari gurunya. Disiplin dan praktek meletakkan kejujuran di atas segalanya adalah pelajaran lain yang sangat berharga dari Bapak. Alhamdulillah, ibunda saya, Siti Nurjannah masih sempat menyaksikan pengukuhan pada hari ini. Saya ingin mempersembahkan acara ini sebagai rasa cinta yang tulus kepada beliau. Tanpa doa dan dukungan dari ibu saya yang saya tidak

akan jadi apa-apa. Kepada beliau berdua, yang memberikan bimbingan dan cinta tak terhingga sembah sujud dari ananda. Kesempatan ini ingin saya sampaikan kepada ayah dan ibu mertua, Darmis Darusamin dan Nurlina Darmis dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan yang tulus dan ikhlas

Dukungan yang tulus juga dari keluarga besar, kakak-kakak saya, Kemala Nasriah dan Zaki Mubarak, Keumala Nasrina dan keluarga, Kemala Nasriyanti dan Dermawan Siregar, dan adik-adik saya, Mohamad Safwan dan Cut Trihasmurni dan Kamelia Nasri, dan Reza Fahlevi bersama seluruh keponakan sangat membantu. Penghargaan saya ingin sampaikan pula kepada keluarga Admi Umar yang “praktis” telah banyak berperan sebagai pengganti orang tua saya sejak saya “merantau” ke Tanah Jawa tahun 1982.

Saya ingin menyampaikan terimakasih kepada istri saya tercinta Dina Meirani yang telah dengan pengertian dan kasih sayang yang tulus mendampingi saya serta berperan menjadi kepala rumah tangga di rumah sementara saya menghabiskan waktu di kantor. Acara ini untuk juga ingin saya persembahkan sebagai hadiah pernikahan 10 tahun kami 3 minggu lalu. Tiga pangeranku yang “handsome” : Mohamad Azzura Ghafara (Agam), Mohamad Anugra Ghafari (Gafa) dan Mohamad Gibranavic Ghafaru (Gibra) dengan tingkah dan celotehan mereka telah membuat hidup selalu terasa nyaman. Kalian berempat membuat hidup saya lebih bermakna. Kalian berempat adalah the core of my love.

Last but not the least, kepada seluruh undangan yang telah dengan sabar mendengar pidato pengukuhan ini saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT memberkati dan melindungi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Y. (2010), Unveiling Stubborn Inflation in Indonesia, mimeo, Office of the Vice President of Republic of Indonesia.
- Banerjee, A., and E. Duflo. 2003. "Inequality and Growth: What Can the Data Say?" *Journal of Economic Growth* 8: pp 267–99.
- Byerlee, Derek, Alain de Janvry dan E. Sadoulet. 2010, Agriculture for Development-Revisited: Lesson from the University of California Berkeley Conference, October 1 dan October 2,
- Besley, Timothy and Louise J.Cord (eds). 2007, Delivering on the Promise of Pro Poor Growth: Insights and Lessons from Country Experiences, A copublication between Palgrave Macmillan and the World Bank.
- Besley, Timothy , Ruben Burges and Betha Esteve-Volart, 2007, "The Policy Origins of Poverty and Growth in India" dalam Besley, Timothy and Louise J.Cord (eds). 2007, Delivering on the Promise of Pro Poor Growth: Insights and Lessons from Country Experiences, A copublication between Palgrave Macmillan and the World Bank
- Alesina, Alberto, and Dani Rodrik, 1994, "Distributive Politics and Economic Growth," *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 109 (May), pp. 465–90.
- Barro, R. 1991. "Economic Growth in a Cross-Section of Countries." *Quarterly Journal of Economics* 106: 407–43.
- . 2000. "Inequality and Growth in a Panel of Countries." *Journal of Economic Growth* 5: 5–32.
- . 2001. "Human Capital and Growth." *American Economic Review* 91: 12–17.
- Bénabou, Roland, 1996, "Inequality and Growth," in NBER Macroeconomics Annual: Volume II, ed. by Ben Bernanke and Julio Rotemberg (Cambridge, Mass.: MIT Press).
- Birdsall, Nancy, and Juan Luis Londoño, 1997, "Asset Inequality Matters: An Assessment of the World Bank's
-
-

- Approach to Poverty Reduction,” *American Economic Review*, Vol. 87(May), pp. 32–37.
- Birdsall, N., and C. Graham. 1998. “New Ways of Looking at Old Inequities: Market Reforms, Social Mobility, and Sustainable Growth (Latin America in Comparative Context).” Working paper, Brookings Institution and the Inter-American Development Bank, Washington, DC.
- Bloom, D. E., D. Canning, and J. Sevilla. 2003. “Geography and Poverty Traps.” *Journal of Economic Growth* 8: 355–78.
- Bourguignon, François, and Christian Morrisson, 1998, “Inequality and Development: The Role of Dualism,” *Journal of Development Economics*, Vol. 57 (December), pp. 233–57.
- Bourguignon, François, William H. Branson, and Jaime de Melo, 1989, *Macroeconomic* Bruno, Michael, and William Easterly, 1998, “Inflation Crises and Long-Run Growth,” *Journal of Monetary Economics*, Vol. 41(February), pp. 3–26.
- . 2003. “The Growth Elasticity of Poverty Reduction; Explaining Heterogeneity across Countries and Time Periods.” In *Inequality and Growth: Theory and Policy Implications*, ed. T. Eicher and S. Turnovsky. Cambridge, MA: MIT Press.
- . 2004. “The Poverty-Growth-Inequality Triangle.” Unpublished paper, World Bank, Washington, DC.
- Bourguignon, F., and S. Chakravarty. 2003. “The Measurement of Multi-Dimensional Inequality.” *Journal of Economic Inequality* 1 (1): 25–49.
- Bourguignon, F., F. Ferreira, and P. Leite. 2002. “Beyond Oaxaca-Blinder: Accounting for Differences in Household Income Distributions across Countries.” Policy Research Working Paper 2828, World Bank, Washington, DC.
- Bourguignon, F., F. Ferreira, and N. Lustig. 2005. *The Microeconomics of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America*. Washington, DC: World Bank.
- Bourguignon, F., F. Ferreira, and M. Menendez. 2003. “Inequality of Outcomes and Inequality of Opportunities in Brazil.” *Texto para discussao 48*, Departamento de Economia, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
-
-

- Bourguignon, F., and C. Morrisson. 2002. "Inequality among World Citizens." *American Economic Review* 92 (4): 727–44.
- Bowles, S., S. Durlauf, and K. Hoff. 2004. *Poverty Traps*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bravo-Ortega, C., and D. Lederman. 2005. "Agricultural and National Welfare around the World: Causality and International Heterogeneity since 1960." Policy Research Working Paper 3499, World Bank, Washington, DC.
- Bruno, M., and W. Easterly. 1998. "Inflation Crises and Long-Run Growth." *Journal of Monetary Economics* 41: 3–26.
- Bulir, A. 2001. "Income Inequality: Does Inflation Matter?" IMF Staff Paper 48, 139–59, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Carter, M. R., and C. B. Barrett. 2005. "The Economics of Poverty Traps and Persistent Poverty: An Asset-Based Approach." Working paper, University of Wisconsin, Madison.
- Chaudhuri, S., J. Jalan, and A. Suryahadi. 2002. "Assessing Household Vulnerability to Poverty: A Methodology and Estimates for Indonesia." Department of Economics Discussion Paper 0102-52, Columbia University, New York.
- Christiaensen, Luc dan Lionel Demery (2007), *Down to Earth: Agriculture and Poverty Reduction in Africa*, Washington D.C: The World Bank
- Christiaensen, Luc, Lionel Demery dan J Kuhl (2006), "The Role of Agriculture in Poverty Reduction- An Empirical Perspective", World Bank Policy Research Working Paper No 4013.
- Chen, Saochen and Ravalion, Martin forthcoming "The Developing World is Poorer than we Thought, but no Less Successful in the Fight Against Poverty", *Quarterly Journal of Economics*,
- Chu, Ke-young, and Sanjeev Gupta, eds., 1998, *Social Safety Nets: Issues and Recent Experiences* (Washington: International Monetary Fund).
- Dasgupta, R., and D. Ray. 1986. "Inequality as a Determinant of Malnutrition and Unemployment: Theory." *Economic Journal* 96 (384): 1011–34.
- Datt, Gaurav, and Martin Ravallion, 1992, "Growth and Redistribution
-
-

- Components of Changes in Poverty Measures: A Decomposition with Applications to Brazil and India in the 1980s,” *Journal of Development Economics*, Vol. 38 (April), pp. 275–95.
- , 1998, “Farm Productivity and Rural Poverty in India,” *Journal of Development Studies*, Vol. 34 (April), pp. 62–85.
- Deaton, A 1997. “The Analysis of Households Surveys: A Micro-economic Approach to Development Policy.” Washington, DC, World Bank.
- . 2005. “Measuring Poverty in a Growing World (or Measuring Growth in a Poor World).” *Review of Economics and Statistics* 87 (1, February): 1–25.
- Deaton, A., and C. Paxton. 1994. “Intertemporal Choice and Inequality.” *Journal of Political Economy* 102 (3): 437–67.
- Deaton, A., and C. Paxson, 2000, “Growth and Saving Among Individuals and Households,” *Review of Economics and Statistics*, Vol. 82 (May), pp. 212–25.
- de Ferranti, D., G. Perry, F. Ferreira, and M. Walton. 2004. *Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking with History?* Washington, DC: World Bank.
- de Ferranti, D., G. Perry, D. Lederman, A. Valdes, and W. Foster. 2005. *Beyond the City: The Rural Contribution to Development.* Washington, DC: World Bank.
- Deininger, Klaus, 1999, “Asset Distribution, Inequality, and Growth,” Development Research Group (Washington: World Bank).
- , and Lyn Squire, 1998, “New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth,” *Journal of Development Economics* Vol. 57 (December), pp. 259–87.
- Dell’Ariccia, G., E. Detragiache, and R. Rajan. 2005. “The Real Effect of Banking Crises.” IMF Working Paper WP/05/63, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Dollar, D. 1992. “Outward-Oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976–85.” *Economic Development and Cultural Change* 40: 523–44.
- Dollar, D., and A. Kraay. 2002. “Growth Is Good for the Poor.” *Journal of Economic Growth* 7: 195–225.
- . 2003. “Institutions, Trade, and Growth.” *Journal of Monetary*
-
-

- Economics 50: 133–62.
- . 2004. “Trade, Growth, and Poverty.” *Economic Journal* 114 (493): 22–49.
- Durlauf, S., and D. Quah. 1999. “The New Empirics of Economic Growth.” In *Handbook of Macroeconomics*, ed. J. Taylor and M. Woodford. Amsterdam: North-Holland.
- Easterly, W. 1999. “Life during Growth.” *Journal of Economic Growth* 4: 239–76.
- Duflo, Ester (2006), “Is Farmer rational?” in A.V. Benerjee, R. Benabou dan D. Mookherjee (eds) *Understanding Poverty*, New York, Oxford University Press.
- Easterly, W., and S. Fischer. 2001. “Inflation and the Poor.” *Journal of Money, Credit and Banking* 33:160–78.
- Easterly, W., and S. Rebelo. 1993. “Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation.” *Journal of Monetary Economics* 32: 417–58.
- Easterly, W., and L. Servén. 2003. *The Limits of Stabilization: Infra-structure, Public Deficits, and Growth in Latin America*. Washington, DC: World Bank
- Fallon, Peter, and Vivian Hon, 1999, “Poverty and Labor-Intensive Growth.” Note prepared for World Development Report 2000/2001 (unpublished; Washington: World Bank).
- Fischer, Stanley, 1993, “The Role of Macroeconomic Factors in Growth,” *Journal of Monetary Economics*, Vol. 32 (December), pp. 485–512.
- Forbes, Kristin, 2000, “A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth,” *American Economic Review*, Vol. 90 (September), pp. 869–887.
- Frankenberg, Elizabeth, Duncan Thomas, and Kathleen Beegle. 1999. “The Real Costs of Indonesia’s Economic Crisis: Preliminary Findings from the Indonesia Family Life Surveys.” Labor and Population Program Working Paper Series 99-04. Santa Monica, CA: Rand.
- Ghosh, Atish, and Steven Phillips, 1998, “Warning: Inflation May Be Harmful to Your Growth,” *IMF Staff Papers*, International Monetary Fund, Vol. 45 (December), pp. 672–710.
- Ghosh, Margaret, Carlo del Ninno, Emil Tesliuc and Azedine Oureghi, 2008, *For Protection and Promotion: The Design and*
-
-

- Implementation of Effect Safety Nets, Washington, DC: World Bank
- Honohan, P. 2004. "Financial Development, Growth and Poverty: How Close Are the Links?" Policy Research Working Paper 3203, World Bank, Washington, DC.
- Hausmann, Ricardo, 1999, "Managing Terms of Trade Volatility," World Bank PREM Note No. 18, February (Washington: World Bank).
- Iradian, G. 2005. "Inequality, Poverty, and Growth." IMF Working Paper WP/05/28, International Monetary Fund, Washington, DC, February.
- Ikhsan, Mohamad. 1999, "Disaggregation of Indonesian Poverty: Policy and Analysis", Unpublished dissertation, University of Illinois.
- , 2005, "Rice Price Adjustment and its impact to the Poor", Economic and Finance in Indonesia Vol 53, No 1
- , 2009, "Mengoptimalkan Pengeluaran Pemerintah untuk Memperbaiki Distribusi Pendapatan di Indonesia" LPEM-Working Paper
- , forthcoming, Dinamika pasar tenaga kerja dalam Krisis Ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan: Pengalaman Krisis Asia 1997- 98 dan Krisis Global 2007-2009.
- 2010, "Membuat Program Kemiskinan Efektif Menjangkau Orang Miskin", Esai Pemikiran dalam rangka HUT FEUI ke 60, BO Economica dan Penerbit Salemba Empat.
- Ikhsan, Mohamad et al (forthcoming), "Policy Options for Poverty Reduction and Improving Income Distribution in Indonesia" LPEM Working Paper.
- Ikhsan, Mohamad, Usman dan Syarif Syahril (forthcoming), "Dampak Distribusi Pendapatan dari Subsidi Pupuk" LPEM Working Paper LPEM-FEUI, PSEK UGM dan PSE IPB (2006) , Roadmap Sektor Pangan dalam Abad 21, Laporan Penelitian
- International Monetary Fund (2006), Explaining Higher Inflation in Indonesia, IMF Staff Report: Selected Issues.
- Izquierdo, Alejandro, 1999, "Credit Constraints and the Asymmetric Behavior of Asset Prices and Output under External Shocks," (Doctoral Dissertation, University of Maryland).
- Jacoby, H. 1994. "Borrowing Constraints and Progress through School:
-
-

- Evidence from Peru.” *Review of Economics and Statistics* 76 (1): 151–60.
- Jacoby, H., and E. Skoufias. 1997. “Risk, Financial Markets, and Human Capital in a Developing Country.” *Review of Economic Studies* 64 (3): 311–35.
- Jalan, J., and M. Ravallion. 1999. “Income Gains to the Poor from Workfare: Estimates for Argentina’s *Trabajador* Program.” Policy Research Working Paper 2149, World Bank, Washington, DC.
- . 2002. “Geographic Poverty Traps? A Micro Model of Consumption Growth in Rural China.” *Journal of Applied Econometrics* 17: 329–46.
- Japan International Cooperation Agency dan Waseda University, 2010, “Indonesia: A Study on Support to Small and Medium Enterprises and Social Safety Net Program to Cope With Economic Crisis”, Final Report, Januari
- Kakwani, N., and E. Pernia. 2000. “What Is Pro-Poor Growth?” *Asian Development Review* 18: 1–16.
- Kakwani, N., and H. Son. 2003. “Pro-Poor Growth: Concept, Measurement, and Application.” Unpublished paper, University of New South Wales, Australia.
- Kraay, A. 2004. “When Is Growth Pro-Poor? Cross-Country Evidence.” IMF Working Paper 4-47, International Monetary Fund, Washington, DC.
- . 2005. “When Is Growth Pro-Poor? Evidence from a Panel of Countries.” *Journal of Development Economics*.
- Kremer, M. 1993. “The O-Ring Theory of Economic Development.” *Quarterly Journal of Economics* 108 (3): 551–75.
- Krugman, P. 1991. “Increasing Returns and Economic Geography.” *Journal of Political Economy* 99 (3): 483–99.
- Little, I., R. Cooper, W. M. Corden, and S. Rajapatirana, 1993, *Boom, Crisis and Adjustment: The Macroeconomic Experience of Developing Countries* (Oxford: Oxford University Press).
- Li, H., and H. Zou. 1998. “Income Inequality Is Not Harmful for Growth: Theory and Evidence.” *Review of Development Economics* 2 (3): 318–34.
- Londoño, J. L., and M. Székely. 2000. “Persistent Poverty and Excess
-
-

- Inequality: Latin America, 1970–1995.” *Journal of Applied Economics* 3 (1): 93–134.
- Lopez, H. 2004. “Pro-Poor-Pro-Growth: Is There a Trade Off?” Policy Research Working Paper 3378, World Bank, Washington, DC.
- Lopez, H., and L. Servén. 2005a. “A Normal Relationship? Poverty, Growth and Inequality.” World Bank, Washington, DC.
- . 2005b. “Too Poor to Grow.” World Bank, Washington, DC.
- Lopez-Calva, Luis Felipe, 2010, *Declining Inequality in Latin America: A Decade of Progress*, Brookings Institution Press, Washington D.C
- LPEM-FEUI, PSEK UGM dan PSE IPB (2006) , Roadmap Sektor Pangan dalam Abad 21, Laporan Penelitian
- Lucas, R. E. 1988. “On the Mechanics of Economic Development.” *Journal of Monetary Economics* 22 (1): 3–42.
- Lustig, N., O. Arias, and J. Rigolini. 2003. “Poverty Reduction and Economic Growth: Two-Way Causality.” Inter-American Development Bank, Washington, DC.
- Machmud, T.A. (2007), *The Determinants of Inflation in Indonesia*, Phd Thesis, Australian National University.
- Masson, Paul, Miguel Savastano, and Sunil Sharma, 1997, “The Scope for Inflation Targeting in Developing Countries,” IMF Working Paper No. 97/130 (Washington: International Monetary Fund).
- McCullough. Neil dan C Peter Timmer (special editors) 2008, “Rice Policy in Indonesia” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 44 No, 1
- McCullough. Neil, 2008, “Rice Price and Poverty in Indonesia”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 44 No, 1
- McCulloch, Neil, C. Peter Timmer and Julian Weisbrod,(2006), “Pathways Out of Poverty During an Economic Crisis: An Empirical Assessment of Rural Indonesia”, Center for Global Development Working Paper No.115
- Morley, S. 2000. “The Effects of Growth and Economic Reform on Income Distribution in Latin America.” *CEPAL Review* 71: 23–40.
- North, D. 1990. *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- OECD (2010), *Economic Survey of Indonesia*, Economic and
-
-

Development Review Committee.

Perry, Guillermo, dkk, 2006, *Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Cycles*, World Bank, Washington, DC.

Perotti, Roberto, 1992, "Income Distribution: Politics and Growth," *American Economic Review*, Vol. 82 (May), pp. 311–16.

Persson, Torsten, and Guido Tabellini, 1994, "Is Inequality Harmful for Growth?" *American Economic Review*, Vol. 84 (June), pp. 600–21.

Pritchett, L., A. Suryahadi, and S. Sumarto. 2000. "Quantifying Vulnerability to Poverty. A Proposed Measure Applied to Indonesia." Policy Research Working Paper 2437, World Bank, Washington, DC.

-----2006 "Transfers and Safety Nets in Poor Countries: Revisiting the Trade-Offs and Policy Options," in Abhijit Banerjee, Roland Benabou and Dilip Mookerjee (eds), *Understanding Poverty*, Oxford University Press,

-----2007 "Poverty and Growth Revisited," in *The Elgar Companion to Development Studies* in David Clark, ed., Edward Elgar, Cheltenham.

-----2009 "Inequality is Bad for the Poor," in *Inequality and Poverty Re-Examined*, edited by John Micklewright and Steven Jenkins, Oxford: Oxford University Press.

-----, 2010 (a) "A Comparative Perspective on Poverty Reduction in Brazil, China and India," *World Bank Research Observer*,

-----2010 (b) "The Pattern of Growth and Poverty Reduction in China," (with Jose Montalvo) *Journal of Comparative Economics*, Vol. 38, pp. 2-16.

Sahn, David, Paul Dorosh, and Stephen Younger, 1997, *Structural Adjustment Reconsidered: Economic Policy and Poverty in Africa*, (New York: Cambridge University Press).

Sarel, Michael, 1996, "Nonlinear Effects of Inflation on Economic Growth," *Staff Papers*, International Monetary Fund, Vol. 43 (March), pp. 199–215.

Thorbecke, Erik, and Hong-Sang Jung, 1996, "A Multiplier Decomposition Method to Analyze Poverty Alleviation," *Journal of Development Economics*, Vol. 48 (March), pp. 279–300.

Timmer, C. Peter, 1997, "How Well Do the Poor Connect to the Growth Process?" *Consulting Assistance on Economic Reform Discussion Paper No. 178*.

- (Cambridge, Mass.: Harvard Institute for International Development).
- , 2007, "How Indonesia Connected the Poor to Rapid Economic Growth", dalam Besley, Timothy and Louise J. Cord (eds). 2007, *Delivering on the Promise of Pro Poor Growth: Insights and Lessons from Country Experiences*, A copublication between Palgrave Macmillan and the World Bank
- Warr, Peter dan Arief Anshory Yusuf. 2009. "International Food Prices and Poverty in Indonesia", Australian National University Working Paper No 19
- White, Howard, and Edward Anderson, 2002, "Growth Versus Distribution: Does the Pattern of Growth Matter?", Institute of Development Studies, University of Sussex.
- World Bank, 1982, *Accelerated Development in Sub-Saharan Africa* (Washington: World Bank).
- World Bank, 2000, *World Development Report* (New York and Washington: Oxford University Press and World Bank).
- World Bank. 1990. *World Development Report 1990: Poverty*. Washington, DC: World Bank.
- . 2001. *World Development Report: Attacking Poverty*. Washington, DC: World Bank.
- . 2005a. *Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reforms*. Washington, DC: World Bank.
- . ———. 2005b. *Pro-Poor Growth in the 1990s: Lessons and Insights from 14 Countries*. Washington, DC: World Bank.
- . 2006 *Indonesia: Making the New Indonesia Work for the Poor*. Report 37349-ID. Washington, DC: World Bank.
- 2007a, *World Development Report 2008*, New York: Oxford University Press
- . 2007b. *Fiscal Policy for Growth and Development Further Analysis and Lessons from Country Case Studies*. Washington, DC: World Bank.
- . 2009. *Conditional Cash Transfers for Attacking Present and Future Poverty*. Washington, DC: World Bank.
-
-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**KETERANGAN PERORANGAN**

Nama Lengkap : Dr. Mohamad Ikhsan S.E., M.A.
NIP/NUK : 196411071989031002
Pangkat dan Golongan Ruang : Penata Tk. I / III/d
Tanggal Lahir / Umur : 7 November 1964 / 46 tahun
Tempat Lahir : Sigli
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Status Pernikahan : Menikah
Alamat Rumah : Jl. Siaga Bappenas No.16A Pejaten
Barat Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Kode Pos : 12510
No. Telepon : 02179182087
No. HP : 08158171107
E-mail : mohamad.ikhsan@ui.ac.id
ican@lpem-feui.org

PENDIDIKAN**PENDIDIKAN DIDALAM DAN DILUAR NEGERI**

1976 SDN 16 - Banda Aceh
1980 SMP Negeri I - Banda Aceh
1983 SMA Negeri 3 IPA Bandung
1988 Fakultas Ekonomi UI Jurusan Studi Pembangunan Jakarta
1991 Vanderbilt University, Departemen Ekonomi konsentrasi: Ekonomi
Moneter dan Internasional USA

1998 University of Illinois, Departemen Ekonomi, Konsentras: Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Internasional

RIWAYAT PEKERJAAN

Ags 1999 ~ Ags 2005 Anggota LP3E, Kadin Indonesia
 Des 1999 ~ Sep 2007 Anggota Dewan Maritim, Republik Indonesia
 Des 1999 ~ Jul 2001 Wakil Kepala, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI
 Okt 2000 ~ Okt 2005 Wakil Ketua Pokja Ekonomi, Lemhanas
 Ags 2001 ~ Mei 2005 Kepala, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI
 Jun 2003 ~ Jun 2004 Komisaris Independen, PT Indosat
 Okt 2004 ~ Okt 2009 Staf Khusus Menko Perekonomi, Menko Perekonomian
 Jan 2006 ~ Des 2009 Anggota Dewan Riset Nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi
 Jun 2006 ~ ... Komisaris Independen, PT Bakrie Brothers
 Jan 2007 ~ Des 2009 Anggota Masyarakat Ekonomi Statistik, BPS
 Jun 2008 ~ ... Komisaris , PT Danareksa
 Jan 2009 ~ ... Board of Trustee International Food Policy Research Institute, IFPRI
 Okt 2009 ~ ... Staf Khusus Wakil Presiden, Setwapres

TANDA JASA / PENGHARGAAN

2003 Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden R.I. Atas pengabdiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil , Penerima Penghargaan , RI , Piagam No. 09835 -22/2003 tanggal 15 April 2003

2003 Maheswara Tingkat 3 atas pengabdian yg telah diberikan dalam bidang Pendidikan sbg Maheswara slama 2 thn s/ dengan 7 tahun berturut-turut dari Lemhanas , Penerima Penghargaan , RI , Piagam No. 131/MWIII/L/2003 tanggal 20 Mei 2003

PENGALAMAN**SIMPOSIUM / SEMINAR / PANITIA**

- 2002 Sbg Pembahas Utama pd Seminar Nasional:
(Rekonseptualisasi Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI
(SANKRI) Dlm Menghadapi Tantangan Abad XXI,
diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara dlm
rangka Ulang Th Ke-45 Lembaga Administrasi Negara)
- 2003 13th International Training Program on Utility Regulation and
Strategy (13-24 Januari 2003)
- 2003 Peserta, 1st Business & Executive Gathering, dengan topik: “UU
BUMN & UU Keuangan Negara Tahun 2003: Arah Baru
Pengelolaan BUMN”
- 2003 Sebagai Pembicara dalam diskusi “Pengurangan Subsidi BBM”
- 2003 Speaker: “Prospect of Indonesia Economy in 2004: Issues,
Challenges and Opportunities
- 2003 Pembicara dalam Second Regional Conference on Poverty
Reduction Strategies (16 - 18 Oktober 2003)
- 2003 Speaker in the Construction and Interior business seminar and
Mechanical Electrical talk show forum “Trend of Construction and
Interior Projects in Indonesia 2004”
- 2004 Pembicara Workshop “Infrastructure in East Asia: The Way
Forward” (15-16 Januari 2004)
- 2004 Sebagai Pembahas Kebijakan Perdagangan Pangan di Era
Global, diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
- 2004 Sebagai Pembicara dalam seminar, dengan topik: “Indonesian
Financial Service Expo 2004
- 2004 Pembicara pada Press Outing, dengan topik: Menuju Sistem
-
-

- Keuangan Yang Sehat Pasca Krisis Ekonomi
- 2004 Sebagai Pembicara dalam diskusi Rapat Anggota Tahunan, dengan topik: “Kondisi Ekonomi Indonesia tahun 2004, Tantangan dan Peluang bagi Industri Perasuransian, diselenggarakan oleh Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia
- 2004 Sebagai Pembicara pada seminar sehari, dengan topik: “Refleksi Lima Tahun UU. No.5 Tahun 1999”, diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
- 2004 Pembicara dlm seminar Komisi Konstitusi,”Sistem Ekonomi & Sistem Sosial dlm perubahan UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945,pd sesi II dgn topik: “Sistem Jaminan Sosial menurut UUD 1945”, diselenggarakan oleh MPR RI
- 2004 Tokyo Workshop on Effectiveness of IMF Surveillance, diselenggarakan oleh International Monetary Fund (IMF).
- 2004 Sebagai Narasumber pada seminar dalam rangka workshop dan pameran tradisi menabung pada masyarakat Indonesia yang diikuti oleh 100 orang peserta, diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 10 Mei 2004
- 2004 Peserta a Conference on Scaling Up Poverty Reduction dan High Level Seminar on Asia Cooperation and Development (25 - 27 Mei , dan 21 Juni 2004)
- 2004 Conference Miracles and Mirages in East-Asian Economic Development
- 2004 Invitation to a Conference in Shanghai on Scaling UP Poverty Reduction (25-27 Mei 2004)
- 2004 Sebagai Pembicara pada acara Rountable Discussion, “Menata kembali pola Linkage Program Bank Umum dengan BPR yang efektif”
- 2004 Sebagai Narasumber dalam acara Workshop Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, di selenggarakan oleh Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) (7/8 Juni 2004)
- 2004 Sebagai Pembicara pada acara seminar Prospek dunia usaha dan potensi pembiayaannya oleh Perbankan (7 - 8 Juni 2004)
- 2004 Pembicara Seminar serial Ekonomi Mendatang
- 2004 Sebagai Pembicara dlm acara Lokakarya, Menuju Suatu Sistem Jaminan Sosial Yg Dpt Diimplementasikan,dengan `

- topik:(Dampak Fiskal dr RUU Sistem amanan Sosial Nasional(SJSN),oleh Growth Through Investment,Agriculture& Trade(GIAT)bekerjasama dgn BAPPENAS
- 2004 Sebagai Pembicara pada seminar Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP)
- 2004 Sebagai Narasumber dalam acara Lokakarya Evaluasi: Dampak Kebijakan Makroekonomi, Sosial dan Politik terhadap Penanggulangan Kemiskinan, diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- 2004 Sebagai narasumber dalam acara diskusi terbatas tentang Implementasi UU. No.20 Tahun 2002 dan era persaingan industri ketenagalistrikan, diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
- 2004 Sebagai Pembicara dalam acara diskusi tentang dampak ekonomi dari Kekurangan Vitamin dan Mineral di Indonesia, diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- 2004 Sebagai Pembicara pada seminar sehari, dengan tema: “Agama dan Kemiskinan: Peta Kemiskinan Umat dan Bangsa Indonesia, diselenggarakan oleh Center For Moderate Moslem (CMM)
- 2004 Sebagai Pembahas Utama Survei Potensi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia,
- 2004 Sebagai pembahas dalam acara bedah buku “Manajemen Aset”, yang ditulis oleh Sdr. Doli D. Sdiregar, diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
- 2004 Pembicara dalam Seminar Sehari bertemakan: Komisaris Independen: Antara Harapan vs Kenyataa dengan topik “Akuntabilitas atas efektifitas kinerja Komisaris Independen: Antara Harapan vs Kenyataa”
- 2004 Sebagai Penanggap pada seminar Lokakarya (semiloka) dengan tema: “Kesiapan Indonesia Menghadapi Perkembangan Pembentukan Free Trade Areas”
- 2004 Sebagai Pembicara, Pembahas, dan Moderator dalam acara diskusi
-
-

- mengenai Pengkajian Kebijakan dan Pelaksanaan Fasilitas Kredit Ekspor (11 - 12 Agustus 2004)
- 2004 Sebagai Pembicara pada Lokakarya Penyusunan Konsep Strategi Pembinaan Konstruksi&Investasi 2005-2009,dengan topik:”Peran Infrastruktur&Properti dlm Pembangunan,oleh Dept Permukiman&Prasarana Wilayah Badan Pembinaan
- 2004 Sebagai Pembicara dalam Rapat Koordinasi PT. Rajawali Nusantara Indonesia (30-31 Agustus 2004)
- 2004 Sebagai Pembicara presentasi pada Rapat Informasi Pasar Asosiasi Semen Indonesia (ICA), diselenggarakan oleh Asosiasi Semen Indonesia (13-14 Oktober 2004)
- 2004 Peserta Asia Pacific Infrastructure Forum, tanggal 1-3 Desember 2004 di Melbourne, diselenggarakan oleh World Bank, Public-Private Infrastructure Advisory Facility and the Australian and Victorian Government (1 - 3 Desember 2004)
- 2004 Peserta seminar: “Banking Disintermediation and its Implication to Monetary Policy: Theoretical Views and Country Experience (15 - 16 Desember 2004)
- 2005 Sebagai pembahas dalam seminar dengan topik: Strategi Pendanaan Luar Negeri, diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- 2005 Peserta dlm DELRI Sidang CGI ke-14,oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (19 - 20 Januari 2005)
- 2005 Sebagai Pembicara dalam acara BUMN Summit dengan tema: Peningkatan Nilai Melalui Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Perusahaan-Perusahaan BUMN Berbasis Sumber Daya Alam, diselenggarakan oleh Kementerian BUMN
- 2005 Second Annual JPMorgan Global Equity Privatization Forum 2005 (3 - 4 Februari 2005)
- 2005 Tenth Annual Emerging Markets Winter Conference, diselenggarakan oleh JPMorgan (6-9 Februari 2005)
- 2005 Memberi Presentasi pada Pertemuan bersama Dr. Robert Briner, Ketua ICC Internasional Court of Arbitration, di Hotel J.W. Marriott, Jakarta, 16 Februari 2005
- 2005 Sebagai Pembicara dalam acara memfasilitasi diskusi publik
-
-

- mengenai Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, oleh The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 22 Maret 2005
- 2005 Sebagai Pembicara dlm acara seminar sehari, dngn topik: "Economic Partnership Agreements (EPA) antara Indonesia-Jepang: Tantangan & Peluang", oleh Direktorat Jenderal Kerjasama Industri & Perdagangan Internasional
- 2008 Pembicara pada Global Finance Forum on "Oil price volatility, economic impacts, and financial management: risk management experience, best practice, and outlook
- 2009 Pembicara Tokyo Seminar on Indonesia
- 2010 Pembicara Fostering Growth and Reducing Poverty and Hunger in Asia and Latin America Opportunities for Mutual Learning and Cooperation
- 2010 Pembicara Partnership Lecture Series 3: Good Governance dan Pengentasan Kemiskinan

PUBLIKASI

- 1988 Tinjauan Triwulan Ekonomi Indonesia." : co author bersama Karjaman Muchtar dan Faisal Basri dimuat dalam Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol XXXVI, No. 4, Desember 1988.
Perorangan (2)
- 1988 Tinjauan Triwulan Ekonomi Indonesia." Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol XXXVI, No. 1, Maret 1988. : Co-author dengan Soemarno Suroño dan Syahid A. Boejamin dimuat dalam Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol XXXVI, No. 1, Maret 1988.
Perorangan (2)
- 1989 Pelarian Modal Dari Indonesia: Estimasi Dan Faktor Penyebabnya: Penulis Tunggal
Dimuat dalam Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol XXXVII, No. 1, Maret 1989
Perorangan (1)
- 1989 Prospek Ekspor Tekstil 1990: co author bersama Sjahid Boejamin
-
-

- Dalam Moh. Arsjad Anwar et.al, Prospek Ekonomi Indonesia 1989/90, (Jakarta: UI Press, 1989).
Perorangan (1)
- 1989 “Prospek Ekspor Undang 1989: Penulis bersama Sjahid A Boenjamin
Dalam Moh. Arsjad Anwar et.al, Prospek Ekonomi Indonesia 1988/89, (Jakarta: UI Press, 1988).
Perorangan (1)
- 1989 Tinjauan Triwulan Ekonomi Indonesia: co author bersama M.Arsjad Anwar
Dimuat dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Des 1989
Perorangan (1)
- 1990 Pembiayaan Sektor Pemerintah: co author bersama M.Arsjad Anwar dan Faisal Basri
dimuat dalam M. Arsjad Anwar dan Faisal H. Basri dalam M. Arsjad Anwar dkk (eds), Prospek Ekonomi Indonesia 1991-1993, (Jakarta: PT Gramedia dan FEUI, 1992)
Perorangan (2)
- 1992 Interest Determination after Financial Reforms: A Case of Indonesia: Penulis Tunggal
di muat dalam Jurnal Ekonomi Indonesia, No. 1, Vol. 1, 1992
Perorangan (0)
- 1992 Reintrospeksi Fungsi Bulog Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II: Penulis Tunggal
di muat dalam Manajemen Usahawan Indonesia, Juni, 1992
Perorangan (0)
- 1993 Prospek Ekonomi Indonesia dalam Jangka Pendek: Peluang dan Tantangan dalam Sektor Riel dan Utilitas pada Dasawarsa 1990-an: editor bersama M. Arjad Anwar dan Faisal H basri
dipublikasikan oleh FEUI dan PT Gramedia, 1993
Perorangan (2)
- 1993 Prospek Sektor Pertanian Pangan, Perikanan, Peternakan: Co-author dengan Azis Armand
dimuat dalam M.Arjad Anwar dan Iwan J. Azis (eds), Prospek Ekonomi Indonesia, 1992/1993, Jakarta: PT Gramedia, 1993
Perorangan (1)
-
-

- 1995 Transformasi Struktur Produksi: co author bersama M. Chatib Basri dan Kusmadi Saleh
dipublikasikan dalam M. Arsjad Anwar, Faisal Basri dan M. Ikhsan (eds.), Propek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek, Sumber Daya, Teknologi, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
Perorangan (2)
- 1996 Policy Reforms in Indonesia: A Political Economy Perspective: co author bersama M.N Wahid
dimuat dalam The Philippine Review of Economics and Business, June 1996
Perorangan (1)
- 1997 Teori Perdagangan Internasional Baru; Survey Literatur: Penulis Tunggal
dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, No. 2, 1997
Perorangan (0)
- 1997 “Tinjauan Triwulan Ekonomi Indonesia: Penulis Tunggal
dimuat dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia, No. 1, 1997
- 1997 Tinjauan Triwulan Ekonomi Indonesia: Penulis Tunggal
dimuat dalam Ekonomi Keuangan Indonesia, No. 4, Desember 1997.
Perorangan (0)
- 1998 Kredibilitas dan Reformasi Ekonomi: Penulis Tunggal
dimuat dalam Jurnal Hubungan Internasional
Perorangan (0)
- 1998 Political Economy of Privatization in Indonesia: Penulis Tunggal
dimuat dalam Bisnis Ekonomi Politik, Vol. 1, No. 2, Juli 1998
Perorangan (0)
- 1999 A Critical Note on the BPS’s Poverty Line and Measures: Penulis Tunggal
di sajikan dalam Workshop on Poverty Methodology, SIAGA-UGM, Bappenas, USAID, 1999
Perorangan (0)
- 1999 Beberapa Perhitungan Angka Kemiskinan sebelum dan sesudah Krisis Ekonomi: Penulis Tunggal
-
-

Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan

- Dipresentasikan dalam Workshop on Poverty in Indonesia, SIAGA-UGM, Bappenas, 1999
Perorangan (0)
- 1999 Catatan Kritis terhadap Jaring Pengaman Sosial, Workshop on Social Safety Net: Penulis Tunggal
Laporan untuk SIAGA-UGM, Bappenas (Modified version), dan juga dipresentasikan dalam LPEM – IRIS – University of Maryland - USAID Economic Education Program, 1999
Perorangan (0)
- 1999 Macroeconomic Challenges and Small Medium Enterprises, : Penulis Tunggal
paper presented at the World Bank – ILO – ADB Workshop on Indonesia’s SMEs, December 1999
Perorangan (0)
- 1999 Some Notes on Poverty Measurements: An Indonesia Case, : Penulis Tunggal
Bahan Presentasi pada Workshop on Poverty Methodology, UNSFIR – UNDP, 1999
Perorangan (0)
- 1999 The Political Economic Reform in Indonesia under a New Democratic Environment: Penulis Tunggal
paper presented at the International Conference on Economic Reform, Institute Policy Reform, New Zealand
Perorangan (0)
- 1999 The Prospect of Economic Reform under a New Democratic Government: Penulis Tunggal
Paper presented at ASEAN Economic Federation Conference, Manila December 1999
Perorangan (0)
- 2000 Reformasi Institusi dan Pembangunan Ekonomi: Penulis Tunggal
dimuat dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Volume 1 No.2, 2000
Perorangan (0)
- 2001 The Indonesian Poverty Profile: Penulis dan Peneliti Utama
Laporan untuk JICA
Peneliti Utama (3)
-
-

- 2002 80 Tahun Mohammad Sadli: Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru (Editor Utama, diedit bersama Chris Manning dan Hadi Soesastro)
Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, Juni 2002, ISBN: 979-709-036 -1
Perorangan (1)
- 2002 Economic Update 2002: Struggling To Maintain Momentum, (Indonesia Update Series Research School of Pacific and Asian Studies The Australian National University), ISBN 981-230-202-6, Hal. 35-59
Dimuat dalam Local Power and Politics in Indonesia Decentralisation & Democratisation, edited by Edward Aspinal and Greg Fealy
Perorangan (1)
- 2002 Measuring Economic Cost of Corruption: Penulis Tunggal Hamid Basyaib et,al (eds) Stealing from the Poor, Yayasan Aksara and Partnership for Good Governance Reform, 2002
Perorangan (0)
- 2002 Privatisasi BUMN: Mengapa dan Beberapa Kunci Sukses (sebagai Penulis Tunggal)
Dimuat dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia, EKI Vol. XLX No.2-2002, ISSN. 0126-155 X, Hal. 247-276
Perorangan (1)
- 2002 Privatisasi BUMN: Mengapa dan Beberapa Kunci Sukses (sebagai Penulis Tunggal)
Dimuat dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia, EKI, Vol. XLX No.2-2002, ISSN. 0126-155 X, Hal. 247-276
Perorangan (0)
- 2002 Tinjauan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Sebagai Penulis Utama bersama Syarif Syahril)
Dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, EKI Vol. L No.4-2002, ISSN. 0126-155 X, Hal. 385-436
Perorangan (1)
- 2002 Tinjauan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Sebagai Penulis Utama, ditulis bersama Syarif Syahril)
Dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, EKI Vol.
-
-

-
-
- L No.4 - 2002, ISSN. 0126-155 X, Hal. 385 - 436
Perorangan (0)
- 2002 Upah minimum regional kesempatan kerja mencari jalan tengah
(Sebagai Penulis Tunggal)
Kompas Cybermedia, 8 Januari 2002
Perorangan (0)
- 2003 Agenda Ekonomi pada 2004 (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 29 Desember 2003
Perorangan (0)
- 2003 Ekonomi 2004: apakah lebih baik? (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 22 Desember 2003
Perorangan (0)
- 2003 Ekonomi Politik BUMD Mengapa “Reversed Trend” Berlaku
Setelah Desentralisasi? (sebagai Penulis Tunggal)
Dimuat dalam Jurnal Forum Inovasi, Vol. 7: Juni-Agustus 2003,
ISSN. 1412-5846, Hal 48-54
Perorangan (1)
- 2003 IMF and Recent Capital Account Crises, Indonesia, Korea and
Brazil: Evaluation Report: Co author
Laporan Independent Evaluation Office IMF
Anggota (6)
- 2003 Kemiskinan dan Harga Beras (sebagai Penulis Tunggal)
LPEM Working Paper No.3/2003, diterbitkan oleh LPEM-FEUI,
Jakarta, 2003 ISBN: 979-96684-4-1
Perorangan (1)
- 2003 Pembangunan infrastruktur di masa transisi (Sebagai Penulis
Tunggal)
www.korantempo.com, 8 Desember 2003
Perorangan (0)
- 2003 Reformasi Institusi dan Pembangunan Ekonomi (sebagai Penulis
Tunggal)
LPEM Working Paper No.1/2003, diterbitkan oleh LPEM-FEUI,
Jakarta, 2003, ISBN: 979-96684-6-8
Perorangan (1)
- 2003 Subsidy and Medium Term Framework: co author
dimuat dalam Indonesia: Selected Fiscal Issues in the New Era, the
-
-

- World Bank
Anggota (0)
- 2004 Antara campaigning dan governing (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 7 Juni 2004
Perorangan (0)
- 2004 Bagaimana sektor bisnis melihat pemilu (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 5 Maret 2004
Perorangan (0)
- 2004 Benarkah ekonomi orde baru lebih baik (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 26 Maret 2004
Perorangan (0)
- 2004 Bisakah kita mengharapkan parpol melakukan reformasi ekonomi
(Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 12 Maret 2004
Perorangan (0)
- 2004 Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 2 April 2004
Perorangan (0)
- 2004 Desentralisasi dan penanggulangan kemiskinan (Sebagai Penulis
Tunggal)
www.korantempo.com, 10 Mei 2004
Perorangan (0)
- 2004 Kebijakan pemihakan: berhasilkah? Bagian (I) dan Bagian (2) -
Belajar dari Malaysia (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 27 & 28 September 2004
Perorangan (0)
- 2004 Kesejahteraan petani selama krisis (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 19 Januari 2004
Perorangan (0)
- 2004 Kesenjangan Institusi, Integrasi Ekonomi Dunia dan Implikasinya
Kepada Indonesia (sebagai Penulis Tunggal)
LPEM Working Paper No. 7/2004, diterbitkan oleh LPEM-FEUI,
Jakarta, 2004, ISBN: 979-3712-03-1
Perorangan (1)
- 2004 Koperasi, substitusi atau komplemen ekonomi pasar? (Sebagai
Penulis Tunggal)
-
-

- www.korantempo.com, 19 Juli 2004
Perorangan (0)
- 2004 Mencari bentuk kelembagaan pembiayaan mikro kasus Bank RStiglitz dan privatisasi (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 27 Desember 2004
Perorangan (0)
- 2004 Mencari bentuk kelembagaan pembiayaan mikro (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 25 Oktober 2004
Perorangan (0)
- 2004 Mengapa privatisasi tidak populer? (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 17 Februari 2004
Perorangan (0)
- 2004 Mengatasi kelelahan reformasi ekonomi (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 15 Maret 2004
Perorangan (0)
- 2004 Mengembalikan Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam Jangka Menengah: Peran Usaha Kecil dan Menengah (sebagai Penulis Tunggal)
Dimuat dalam Jurnal Analisis Sosial, Vol. 9 No.2 Agustus 2004
ISSN. 1411-0024, Hal. 1-31
Perorangan (1)
- 2004 Pajak tak sekadar alat kebijakan fiskal (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 16 Agustus 2004
Perorangan (0)
- 2004 Pak Laks, GCG, dan Komisaris Independen PLN (Sebagai Penulis Tunggal)
Koran Tempo, 10 Maret 2004
Perorangan (0)
- 2004 Pemilihan pemerintah pada perbankan, masih adakah pbenarannya? (Sebagai Penulis Tunggal)
Kompas Cybermedia, 13 Maret 2004
Perorangan (0)
- 2004 Pemilu dan fluktuasi ekonomi (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 19 Maret 2004
Perorangan (0)
-
-

- 2004 Peran pemerintah dalam perekonomian (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 12 April 2004
Perorangan (0)
- 2004 Perbaiki iklim investasi! Pesan bagi pemerintah baru (Sebagai Penulis Tunggal)
Kompas, 31 Mei 2004
Perorangan (0)
- 2004 Perbaiki Iklim Investasi!, Pesan bagi Pemerintah Baru (sebagai Penulis Tunggal)
Dimuat dalam www.kompas.co.id, Senin, 31 Mei 2004
Perorangan (1)
- 2005 Agenda setelah pertemuan infrastruktur (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 24 Januari 2005
Perorangan (0)
- 2005 Cina, Renminbi, dan Indonesia (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 13 Juni 2005
Perorangan (0)
- 2005 Determinan pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia (Penulis utama, ditulis bersama Widyono Soetjipto)
Research Paper No. 6/2005, diterbitkan oleh LPEM-FEUI, Jakarta, 2005, ISBN : 979-3712-11-2
Perorangan (0)
- 2005 Evaluasi dan prospek ekonomi jangka menengah (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 4 Januari 2005
Perorangan (0)
- 2005 Indonesia's new tax reform: potential and direction (Sebagai Penulis Utama, ditulis bersama Ledi Trialdi dan Syarif Syahril)
Journal of Asian Economics 16 (2005) p. 1029 - 1046
Perorangan (0)
- 2005 Industri manufaktur dan produktivitas (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 16 Mei 2005
Perorangan (0)
- 2005 Infrastruktur (Summit) untuk Siapa? (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 21 Februari 2005
-
-

- Perorangan (0)
- 2005 Isu peningkatan program kompensasi sosial (Sebagai Penulis Tunggal)
Koran Tempo, 18 April 2005
- Perorangan (0)
- 2005 Kajian Dampak Kenaikan Harga BBM 2005 Terhadap Kemiskinan (Penulis Utama, ditulis bersama M. Herman Sulisty, Teguh Dartanto, dan Usman)
LPEM Working Paper 10, diterbitkan oleh LPEM-FEUI, Jakarta, 2005, ISBN: 979-3712-06-6
- Perorangan (1)
- 2005 Kajian LPEM soal Kenaikan Harga BBM dan Kemiskinan (Sebagai Penulis Tunggal)
Kompas, 16 Maret 2005
- Perorangan (0)
- 2005 Kebijakan fiskal sebagai stimulus perekonomian (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 14 November 2005
- Perorangan (0)
- 2005 Kenapa harga BBM naik? (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 3 Oktober 2005
- Perorangan (0)
- 2005 Mengapa perhitungan LPEM dan Hamonangan berbeda? (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 21 Maret 2005
- Perorangan (0)
- 2005 Menjawab Pak Kwik soal BBM (sebagai Penulis Tunggal)
Dimuat dalam Bisnis Indonesia, Senin, 8 Agustus 2005
- Perorangan (1)
- 2005 Operasionalisasi revitalisasi sektor pedesaan dan pertanian (Sebagai Penulis Tunggal)
www.korantempo.com, 8 Agustus 2005
- Perorangan (0)
- 2005 Pertumbuhan ekonomi belum turunkan pengangguran (Sebagai Penulis Tunggal)
Koran Tempo, 11 Juli 2005
-
-

- Perorangan (0)
- 2005 Program kompensasi sosial dan basis data kemiskinan (Sebagai Penulis Tunggal)
Koran Tempo, 4 April 2005
- Perorangan (0)
- 2005 Rice Price Adjustment and its Impact to the Poor, dimuat dalam Economics and Finance in Indonesia Hal. 61-96, EFI, Vol 53 No.1 - 2005, ISSN 0126-155X, sebagai Penulis Tunggal
ISSN 0126-155X, sebagai Penulis Tunggal
- Perorangan (1)
- 2005 Skenario Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah 2005-2009 (sebagai Penulis Tunggal)
LPEM Working Paper 9, diterbitkan oleh LPEM-FEUI, Jakarta, 2005, ISBN: 979-3712-05-8
- Perorangan (1)
- 2006 Flexible market will solve manpower issues (Sebagai Penulis Tunggal)
The Jakarta Post.com, 13 Mei 2006
- Perorangan (0)
- 2006 Paket kebijakan iklim investasi, mengapa dan untuk apa? (Sebagai Penulis Tunggal)
Kompas, 25 Maret 2006
- Perorangan (0)
- 2007 Economic reform under a demographic transition regime and peer review in Indonesia (Sebagai Penulis Tunggal)
Dimuat dalam buku Shaping Policy Reform and Peer Review in Southeast Asia: integrating economies amid diversity,.... Policy Reform, Jakarta, 23 - 24 Januari 2007, ISBN: 978-92-64-03943-8, Hal 177 - 198
- Perorangan (0)
- 2007 Economic reform under a demographic transition regime and peer review in Indonesia (Sebagai Penulis Tunggal)
Dimuat dalam buku Shaping Policy Reform and Peer Review in Southeast Asia: integrating economies amid diversity, Policy Reform, Jakarta, 23 - 24 Januari 2007, ISBN: 978-92-64-03943-8, Hal 177 - 198
-
-

- Perorangan (0)
- 2008 Black Hole or Black Gold? The impact of oil and gas prices on Indonesia's public finances (Sebagai Penulis Pendamping, ditulis bersama Cut Dian R.D. Agustina, Javier Arze del Granado, Tim Bulman, Wolfgang Fengler)
Policy Research Working Paper 4718, diterbitkan oleh The World Bank East Asia and Pasific Region, Pacific Poverty Reduvtion and Economic Management Unit, September 2008
- Perorangan (0)
- 2008 Mengoptimalkan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki distribusi pendapatan di Indonesia (Sebagai Penulis tunggal)
LPEM Working Paper No. 16/2008, diterbitkan oleh LPEM FEUI, Jakarta, 2008, ISBN: 978-979-3712-19-2
- Perorangan (0)
- 2009 Efektifitas nilai tukar nominal sebagai instrumen untuk mendorong nonmigas: tinjauan literatur (Sebagai penulis tunggal)
Staff Paper No. 7/2009, diterbitkan oleh LPEM FEUI, Jakarta, 2009, ISBN: 978-979-3712-25-3
- Perorangan (0)
- 2009 Koperasi substitusi atau komplemen terhadap ekonomi pasar? Suatu catatan pendek (Sebagai Penulis Tunggal)
Staf Paper No. 8/2009, diterbitkan oleh LPEM FEUI, Jakarta, 2009, ISBN: 978-979-3712-24-6
- Perorangan (0)
- 2009 Menciptakan dan Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif (Sebagai Penulis Tunggal)
Dimuat dalam Jurnal Keuangan Negara, Volume 1 Edisi 1 Tahun 2009, ISSN: 2086-0501, Hal. 73 - 95
- Perorangan (0)
- 2009 Menciptakan dan Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif (Sebagai Penulis Tunggal)
Dimuat dalam Jurnal Keuangan Negara, Volume 1 Edisi 1 Tahun 2009, ISSN: 2086-0501, Hal. 73 - 95
- Perorangan (0)
- 2010 Dinamika Pasar Tenaga Kerja dalam Krisis Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan: Pengalaman Krisis Asia
-
-

- 1997- 1998 dan Krisis Global 2007-2009: Penulis Tunggal akan diterbitkan sebagai LPEM-Working Paper
Perorangan (0)
- 2010 GOVERNANCE DAN ORANG MISKIN: Penulis Tunggal
Makalah untuk Governance Lecture No 3, Program Kemitraan dan Ditjen Perguruan Tinggi Mendiknas
Perorangan (0)
- 2010 HARGA EKONOMI BBM SERTA DAMPAK FISKAL DAN DAMPAK PEMERATAAN DARI KEBIJAKAN HARGA BBM DI INDONESIA: Penulis Tunggal
akan diterbitkan sebagai LPEM-Working Paper
Perorangan (0)
- 2010 Kemiskinan di Pedesaan Indonesia: Trend, Determinan dan Kebijakan: Penulis Tunggal
akan diterbitkan sebagai LPEM-Working Paper
Perorangan (0)
- 2010 Membuat Program Kemiskinan Efektif Menjangkau Orang Miskin: Penulis Tunggal
Esai pemikiran dalam Rangka HUT FEUI ke 60, BO Economica dan Penerbit Salemba Empat
Perorangan (0)
- 2010 Penentuan Tarif Listrik di Indonesia: Memadukan Tujuan Efisiensi dan Penurunan Kemiskinan : Penulis Tunggal
akan diterbitkan sebagai LPEM-Working Paper dan merupakan penyempurnaan dari makalah yang disajikan dalam Rapat Pleno ISEI di Mataram, 2008
Perorangan (0)
- 2010 Strategi Industrialisasi untuk Indonesia dalam Iwan Jaya Azis dkk (eds), Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim: Boediono dan Mohamad Ikhsan
diterbitkan oleh Penerbit Keperpustakaan Populer Gramedia, 2101
Perorangan (1)
-
-